



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN

**OPTIMALISASI INTEGRASI SOSIAL DI WILAYAH IBU KOTA NEGARA
GUNA MENJAGA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

OLEH:

RENDRA RADITA DEWAYANA, S.I.K.

KOMBES POL. NRP: 73120426

NOMOR PESERTA: 074

**PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN
(PPRA-LXVI) LEMHANNAS RI TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb., salam sejahtera bagi kita semua.

Penulis mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat kehendak-Nya, penulis telah berhasil menyelesaikan Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) ini dengan judul: **“Optimalisasi Integrasi Sosial di Wilayah Ibu Kota Negara Guna Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia”**.

Penulisan Taskap ini merupakan salah satu tugas dalam menyelesaikan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) - LXVI Lemhannas RI Tahun 2024, berdasarkan Keputusan Gubernur Lemhannas Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2024 tentang Penetapan Judul Taskap Peserta PPRA - LXVI Tahun 2024 Lemhannas RI tanggal 28 Maret 2024.

Pada kesempatan ini, perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA - LXVI di Lemhannas RI tahun 2024. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Pembimbing atau Tutor Taskap yaitu Mayjen TNI (Purn) Hari Mulyono, S.E., M.M. dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing penulis sehingga Taskap ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu dan ketentuan yang ditetapkan Lemhannas RI.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mohon masukan konstruktif dari berbagai pihak guna penyempurnaan naskah ini.

Penulis berharap kiranya Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangsih pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, pemerintah RI khususnya Badan Otorita Ibu Kota Negara, serta bagi siapa pun yang membutuhkannya.

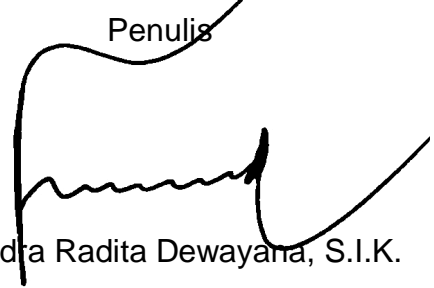
Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan

kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada negara dan bangsa Indonesia tercinta.

Sekian dan terima kasih. Wassalaamualaikum Wr. Wb.

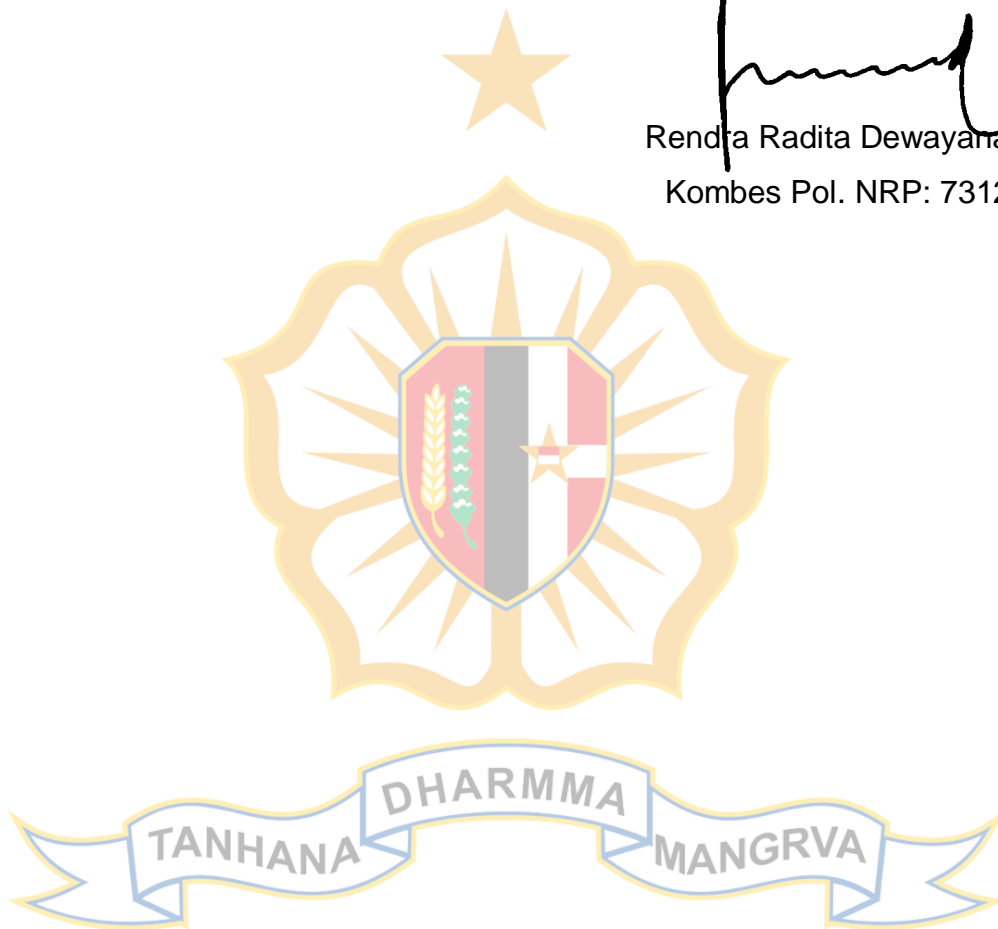
Jakarta, Juli 2024

Penulis



Rendia Radita Dewayana, S.I.K.

Kombes Pol. NRP: 73120426



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rendra Radita Dewayana, S.I.K.

Pangkat : Komisaris Besar

Jabatan : Analis Kebijakan Madya Akpol

Instansi : Polri

Alamat : Asrama Akpol Blok H Nomor 1 Semarang, Jawa Tengah.

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) - LXVI tahun 2024 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

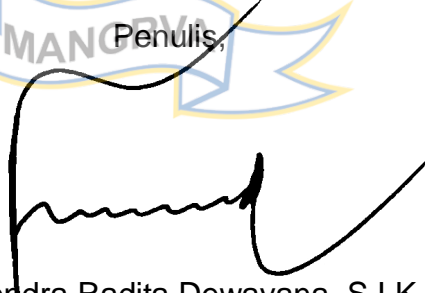
- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia Taskap ini dibatalkan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.



Jakarta, Juli 2024

Penulis,


Rendra Radita Dewayana, S.I.K.
Kombes Pol. NRP: 73120426

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP

Yang bertanda tangan di bawah ini Tutor Taskap dari:

Nama : Rendra Radita Dewayana, S.I.K.
Peserta : Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) -LXVI
Judul Taskap : **Optimalisasi Integrasi Sosial di Wilayah Ibu Kota
Negara Guna Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.**

Taskap tersebut di atas telah ditulis “sesuai/tidak sesuai” dengan Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penulisan Ilmiah Peserta Pendidikan Lemhannas RI Tahun 2024, dan oleh karena itu “layak/tidak layak” dan “disetujui/tidak disetujui” untuk diuji.

*) *Coret yang tidak diperlukan



Jakarta, Juli 2024

Tutor Taskap,

Hari Mulyono, S.E.,M.M.

Mayjen TNI (Purn)

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	5
3. Maksud dan Tujuan.....	5
4. Ruang Lingkup dan Sistematika.....	5
5. Metode dan Pendekatan.....	6
6. Pengertian	7
BAB II LANDASAN PEMIKIRAN	
7. Umum.....	9
8. Peraturan Perundang-Undangan.....	9
9. Data dan Fakta.....	11
10. Kerangka Teoritis.....	15
11. Lingkungan Strategis.....	18
BAB III PEMBAHASAN	
12. Umum.....	32
13. Potensi Disintegrasi Sosial di Wilayah IKN yang Berdampak Terhadap Keutuhan NKRI	32
14. Hambatan/Tantangan Pelaksanaan Integrasi Sosial di Wilayah IKN	42
15. Upaya Optimalisasi Integrasi Sosial di Wilayah IKN Guna Menjaga Keutuhan NKRI	54

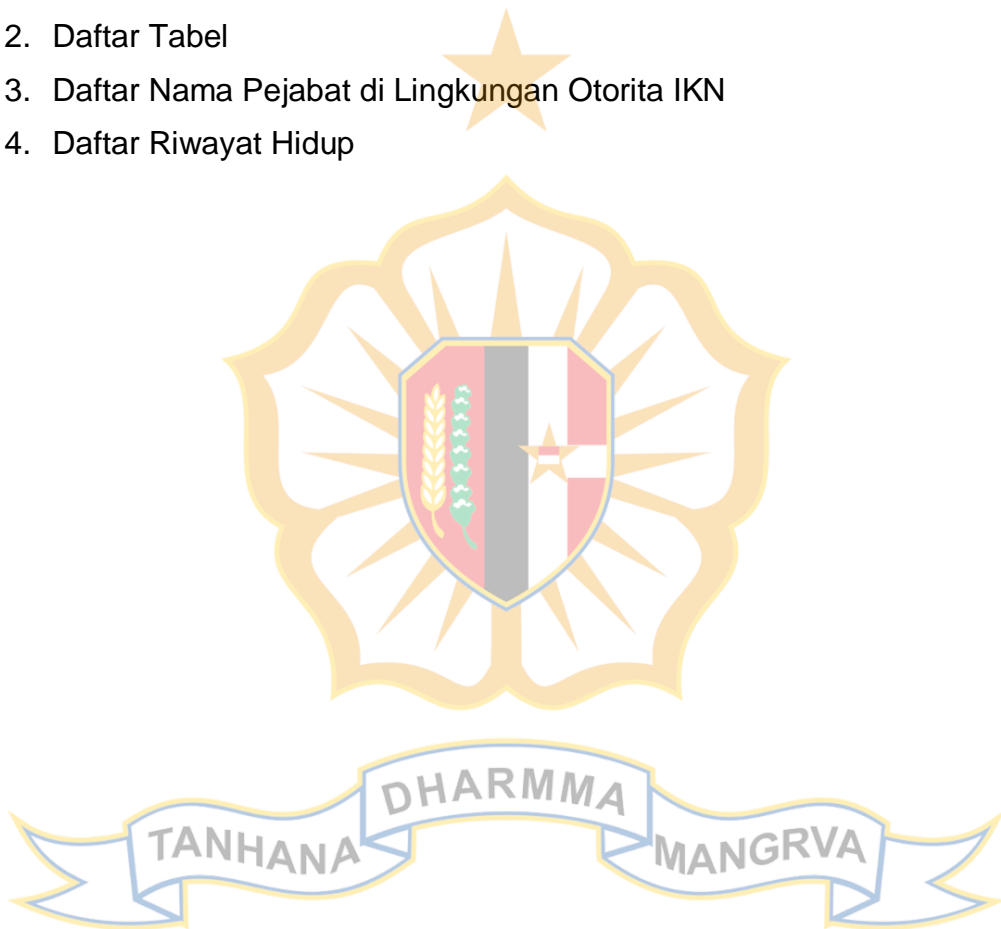
BAB IV PENUTUP

16. Simpulan.....	62
17. Rekomendasi.....	64

DAFTAR PUSTAKA.....	66
----------------------------	-----------

LAMPIRAN:

1. Alur Pikir
2. Daftar Tabel
3. Daftar Nama Pejabat di Lingkungan Otorita IKN
4. Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dinamika perubahan sosial dalam wilayah Ibu Kota Negara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur pasca ditetapkannya UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara harus mendapatkan perhatian seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan wilayah Nusantara sebagai IKN, karena dinamika sosial tersebut menghadirkan permasalahan baru tentang integrasi sosial yang berpotensi memunculkan permasalahan sosial lanjutan sehingga dapat menjadi ancaman bagi keutuhan NKRI. Hal ini dapat terjadi karena IKN adalah simbol identitas nasional dan sekaligus pusat gravitasi (*central of gravity*) yang menjadi magnet perpindahan penduduk antarwilayah di Indonesia dan pertumbuhan ekonomi nasional di masa mendatang.

Dalam konteks pelaksanaan integrasi sosial, dinamika pembangunan di wilayah IKN tentu menghadirkan beberapa permasalahan baru yang membutuhkan penanganan serius, misalnya masalah migrasi penduduk (urbanisasi), sengketa kepemilikan lahan, persaingan antar anggota masyarakat dalam memperebutkan ruang hidup yang bermotif ekonomi dan sebagainya. Karena itu, guna mengantisipasi hadirnya beberapa permasalahan baru tersebut, dibutuhkan pemahaman yang sama diantara para pemangku kepentingan bahwa membangun IKN tentu bukan berarti hanya fokus membangun infrastruktur dan lingkungan fisik semata, tetapi juga harus membangun dan mengintegrasikan manusianya, baik bagi mereka yang akan berpindah ke IKN maupun mereka yang telah lama menetap. Karena model memindahkan IKN sekaligus memindahkan fungsi IKN memiliki makna politis, sedangkan pemerintahan lebih bersifat fungsional.¹ Selain itu, posisi strategis IKN beserta dinamika sosial yang melingkupinya memiliki dampak besar tidak hanya terhadap keutuhan wilayah di IKN dan sekitarnya, namun dalam skala yang lebih besar juga berdampak pada keutuhan NKRI. Sejalan dengan

¹ Nurdin, Nurliah. (2024). *Implementasi Kebijakan IKN Dalam Prespektif Sosial, Budaya, Politik*. Jakarta: Slide paparan PPRA-LXVI Lemhannas RI Tahun 2024. h. 3.

pemahaman demikian, maka mengoptimalkan integrasi sosial di wilayah IKN tentu sangat berguna untuk menjaga keutuhan NKRI.

Dalam penulisan Taskap ini penulis menegaskan bahwa proses integrasi yang terjadi di wilayah IKN masih bersifat prediktif, di mana dalam kurun waktu 5 tahun di masa awal pemindahan, jumlah penduduk IKN tercatat lebih dari 2 juta jiwa.² Dilihat dari sisi demografi, di wilayah IKN terdapat 5 etnis besar yang bermukim sebagai penduduk dengan komposisi persentase jumlah pendatang sebesar 73 persen. Penduduk itu adalah kaum transmigran yang datang di wilayah IKN sejak tahun 1970-an hingga 1980-an, dengan besaran persentase Suku Jawa adalah 30,2 persen, Dayak 9,3 persen, Bugis 20,6 persen, Banjar 12,4 persen dan Suku Kutai sebanyak 7,7 persen.³ Selain itu, Provinsi Kalimantan Timur juga memiliki keanekaragaman etnis, agama, sosial, dan budaya.⁴ Sehingga selaras dengan dinamika kehidupan masyarakat di wilayah IKN, cepat atau lambat permasalahan integrasi sosial tentu akan menjadi hambatan/tantangan serius, karena membutuhkan adaptasi kultur, sosial, budaya antar anggota masyarakat, seiring dengan hadirnya masalah sosial lain seperti sengketa kepemilikan lahan, juga persaingan ekonomi antarpenduduk di wilayah IKN yang dilatabelakangi oleh keanekaragaman masyarakat tersebut tidak dapat dihindari. Ada beberapa contoh permasalahan sosial di wilayah IKN yang merupakan kasus aktual dan menjadi perhatian masyarakat, misalnya kasus sengketa lahan antara pihak perusahaan dan masyarakat.⁵ Kasus 9 warga masyarakat yang ditahan kepolisian meskipun akhirnya ditanggihkan, karena mereka memaksa para pekerja yang sedang membuka lahan proyek bandara VVIP IKN untuk menghentikan aktivitasnya.⁶ Juga kasus kepemilikan lahan 2.086 hektare yang masih bermasalah sebagaimana ditegaskan oleh

² Dwi Susetyo, Pramono (2022). *Beban Ekologis IKN*. <https://www.kompas.id/baca/artikel-opini/2022/03/13/beban-ekologis-ikn>. Diakses 20 Februari 2024, jam 15.30 WIB.

³ Kementerian PPN/Bappenas. (2020). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara*. Jakarta: PPN/Bappenas. h. 105.

⁴ Akulturasi budaya telah berlangsung melalui berbagai proses budaya, interaksi sosial, dan migrasi penduduk yang membentuk keberagaman suku bangsa dan pluralisme budaya. Lihat: Khasan Effendy, *Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara*, Jakarta: Slide paparan PPRA-LXVI Lemhannas RI Tahun 2024. h. 14.

⁵ Anggoro PW. (2018). *Kearifan Lokal Berbasis Transendental: Kasus Sengketa Lahan Adat di Kutai Barat Kalimantan Timur*. Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental, 2018-01. h. 336-346.

⁶ <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/03/03/sempat-ditangkap-soal-lahan-bandara-ikn-penahanan-9-warga-ditanggihkan>, diakses pada Selasa 19 Maret 2024 jam 22.10 WIB.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI Agus Harimurti Yudhoyono, “Yang jelas, dari 36.000 hektare yang sudah disiapkan OIKN ini ada sekitar 2.086 hektare lagi yang masih ada sedikit permasalahan.”⁷ Demikian juga Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) memberikan sinyalemen bahwa lebih dari 20.000 orang yang terdiri dari 19 komunitas adat di Penajam Paser Utara dan 2 kelompok adat/lokal di Kutai Kartanegara akan menjadi korban dari pembangunan IKN. Mereka akan semakin termarginalisasikan dan mengalami kesulitan hidup karena sumber penghidupan mereka sangat tergantung pada hasil laut, sungai, hutan dan kebun.⁸ Guna mengantisipasi berbagai kasus seperti tersebut di atas, pemerintah dalam upaya mengoptimalkan integrasi sosial antaranggota masyarakat di wilayah IKN selama ini telah melaksanakan berbagai pendekatan, diantaranya melalui program transmigrasi, meskipun hasilnya belum optimal. Selain itu, pemerintah juga telah melakukan sosialisasi atas kegiatan pembangunan IKN kepada masyarakat sejak ditetapkannya UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, dan bahkan pemerintah telah mengalokasikan anggaran dalam proses penggantian lahan masyarakat sebesar Rp. 1,42 Triliun. Namun demikian masih saja timbul permasalahan dalam bentuk penolakan serta reaksi pro dan kontra di tengah masyarakat yang dapat mengganggu proses integrasi sosial di wilayah IKN.

Layak dicermati bahwa untuk mengoptimalkan integrasi sosial di wilayah IKN guna menjaga keutuhan NKRI, tentu banyak hambatan/tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan. Juga harus dipahami oleh para pemangku kepentingan dan seluruh komponen bangsa mengenai dampak disintegrasi sosial terhadap keutuhan NKRI serta perlunya merumuskan upaya konkret yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan integrasi sosial di wilayah IKN guna menjaga keutuhan NKRI. Dengan mempertimbangkan berbagai hambatan/tantangan yang ada, juga memperhatikan beberapa aspek dan faktor lain yang melingkupinya, maka upaya untuk mengoptimalkan integrasi sosial di wilayah IKN dapat dilakukan dengan berbagai program yang dilaksanakan

⁷ <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5550029/ahy-masih-ada-2086-hektare-lahan-di-ikn-bermasalah>, diakses pada Rabu, 20 Maret 2024 jam 15.30 WIB.

⁸ Mantalean V. 2022. *Megaproyek IKN, 20.000 Masyarakat Adat Tersingkir dan Dugaan 'Hapus Dosa' Korporasi*. Internet. Diunduh pada Selasa, 19 Maret 2024 jam 17.45 WIB dari link <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/21/08204891/Megaproyek-Ikn20000->

secara serentak dan berkelanjutan, yaitu: pendidikan inklusif, dialog antarbudaya, pelatihan dan pengembangan, kemitraan publik-privat, inisiatif kewirausahaan, program kesejahteraan sosial, dan pengembangan infrastruktur sosial.

Dalam perspektif yang lebih luas, pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa pemindahan IKN dari Jakarta ke Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur dilakukan karena semakin beratnya beban persoalan Jakarta, yaitu masalah urbanisasi, kemacetan, polusi, suplai air bersih, hingga penurunan permukaan tanah yang menjadi sorotan global. Relokasi IKN dari Jakarta ke Nusantara merupakan sebuah keniscayaan dan menjadi salah satu faktor pendukung suksesnya relokasi IKN yang bertujuan untuk mencapai target visi Indonesia Emas tahun 2045 yaitu Indonesia menjadi negara maju, sebagai identitas nasional dan juga untuk menggeser arah pembangunan dari Jawa-sentris menuju Indonesia-sentris,⁹ serta tetap terjaganya keutuhan NKRI dari berbagai ancaman, termasuk ancaman disintegrasi sosial yang potensial terjadi di IKN.

Bertitik tolak dari uraian tentang latar belakang permasalahan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu adanya upaya menyeluruh dari seluruh komponen bangsa dan pemangku kepentingan IKN untuk mengoptimalkan integrasi sosial di wilayah IKN guna menjaga keutuhan NKRI. Sehingga menjadi sangat penting dan mendesak untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan integrasi sosial di wilayah IKN. Bertitik tolak dari pemaparan sebagaimana tersebut di atas, maka penulis menjadikannya sebagai tema kajian Taskap ini.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang seperti tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam Taskap ini adalah: *Bagaimana mengoptimalkan integrasi sosial di wilayah IKN guna menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)?*

⁹ Kementerian PPN/Bappenas. (2022). *Kerangka Pembangunan Indonesia di Bidang IKN, Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Transformasi Digital dan Konsolidasi Demokrasi*. Paparan Zoom Lemhanas: Jakarta. h. 3.

Mengacu kepada rumusan masalah di atas, pertanyaan kajian dalam penulisan Taskap ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana potensi disintegrasi sosial di wilayah IKN yang berdampak terhadap keutuhan NKRI?
- b. Apa hambatan/tantangan pelaksanaan integrasi sosial di wilayah IKN?
- c. Bagaimana upaya optimalisasi integrasi sosial di wilayah IKN guna menjaga keutuhan NKRI?

3. Maksud dan Tujuan

- a. **Maksud.** Maksud penulisan Taskap ini adalah mendapatkan gambaran yang menyeluruh sekaligus memberi masukan terkait upaya optimalisasi integrasi sosial di wilayah IKN guna menjaga keutuhan NKRI.
- b. **Tujuan.** Tujuan penulisan Taskap ini adalah untuk memberi sumbangan gagasan dan pemikiran serta rekomendasi bagi para pemangku kepentingan yang terkait, dalam upaya optimalisasi integrasi sosial di wilayah IKN guna menjaga keutuhan NKRI.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika

- a. **Ruang lingkup.** Ruang lingkup pembahasan dalam naskah Taskap ini, dibatasi pada pembahasan tentang upaya optimalisasi integrasi sosial di wilayah IKN guna menjaga keutuhan NKRI.
- b. **Sistematika.** Memperhatikan ruang lingkup pembahasan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam Taskap ini sistematika penulisannya disusun sebagai berikut:

1) **BAB I Pendahuluan.** Berisi latar belakang dan fakta/data yang relevan dengan tema kajian ini, rumusan masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika, metode dan pendekatan, serta pengertian atau definisi yang terdapat dalam judul Taskap ini.

2) **BAB II Landasan Pemikiran.** Berisi konsep pemikiran yang menjadi dasar argumentasi dan penjelasan dalam penulisan Taskap ini. Pada bab ini juga diuraikan beberapa peraturan perundang-undangan yang

berhubungan dengan tema kajian. Di samping itu, Bab ini juga memaparkan Data dan Fakta yang berupa penjelasan kondisi geografis, demografis, perekonomian, dan sosial budaya. Kemudian dilanjutkan dengan Kerangka Teoritis yang berisi acuan teoritis yang digunakan dalam menyusun kajian Taskap ini, yaitu Teori Optimalisasi, Teori Integrasi Sosial, Teori Persatuan dan Kesatuan, Teori Kontingensi, dan Teori Manajemen Resiko. Bab ini ditutup dengan Lingkungan Strategis yang berisi paparan situasi dan kondisi lingkungan strategis, baik lingkup global, regional, maupun nasional yang terkait dengan tema kajian ini.

- 3) **BAB III Pembahasan.** Bab ini berisi analisis dan penelusuran mengenai potensi disintegrasi sosial yang berdampak terhadap keutuhan NKRI dengan melihat aspek politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Pembahasan berikutnya adalah analisis mengenai hambatan/tantangan dalam pelaksanaan integrasi sosial di wilayah IKN. Dari pembahasan tersebut kemudian disampaikan tentang berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan integrasi sosial di wilayah IKN guna menjaga keutuhan NKRI.
- 4) **BAB IV Penutup.** Berisi Simpulan dan Rekomendasi yang dapat disampaikan sebagai upaya untuk mengoptimalkan integrasi sosial di wilayah IKN guna menjaga keutuhan NKRI.

5. Metode dan Pendekatan

- a. **Metode.** Metode yang digunakan dalam penulisan Taskap ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan menitikberatkan pada data sekunder yang berupa *desk review*, kajian pustaka, studi dokumen dari data, dengan metodologi pembahasan menggunakan *Politic, Economic, Social, Technology, Environment and Legal (PESTEL) Analysis*.
- b. **Pendekatan.** Pendekatan yang digunakan dalam penulisan Taskap ini adalah perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan analisis multidisiplin ilmu yang sesuai dengan kerangka teoritis, data dan fakta, dengan memperhatikan kondisi gatra dan lingkungan strategis yang

disusun secara sistematis, akurat dan faktual dengan mendeskripsikan dua variabel.

6. Pengertian

Judul Taskap ini adalah: Optimalisasi Integrasi Sosial di Wilayah Ibu Kota Negara Guna Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengacu judul tersebut, ada beberapa pengertian atau definisi yang perlu dijelaskan, yaitu:

a. Optimalisasi

Optimalisasi adalah suatu ikhtiar yang dilakukan secara sungguh-sungguh untuk menemukan alternatif terbaik dari beberapa pilihan yang ada, sehingga efektifitas dan efisiensi dapat tercapai dalam penggunaan sumber daya yang ada.¹⁰ Dalam konteks kajian Taskap ini, di wilayah IKN selama ini melalui program transmigrasi sudah terjadi proses integrasi sosial antara penduduk lokal dengan pendatang tetapi belum optimal. Karena itu perlu dioptimalkan lebih baik lagi.

b. Integrasi

Kata integrasi secara definitif adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Penyesuaian antara unsur kebudayaan yang saling berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat.¹¹ Dalam konteks kajian Taskap ini, jenis integrasi yang terkait dengan rumusan permasalahan adalah integrasi sosial.

c. Integrasi Sosial

Integrasi sosial adalah proses penggabungan atau penyatuan di antara unsur-unsur yang berbeda dalam realitas kehidupan masyarakat secara utuh, sehingga menghasilkan suatu harmoni kehidupan yang berfungsi menyerasikan perbedaan dalam kehidupan masyarakat.¹²

d. Ibu Kota Negara (IKN)

¹⁰ Tony M, Wijaya. (2018). *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. h. 142-143.

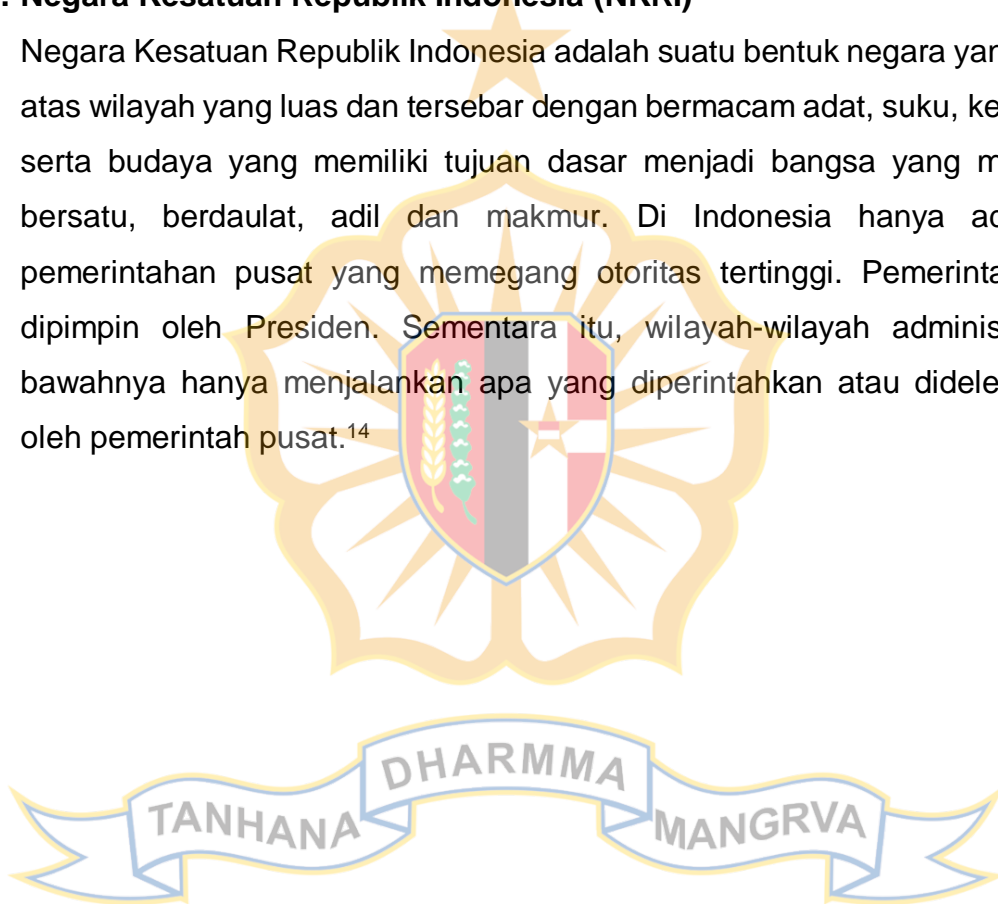
¹¹ <https://kbbi.web.id/integrasi>

¹² Kutoyo, Sutrisno. (2004). *Sosiologi*. Jakarta: Penerbit Grasindo. h. 144.

Menurut UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, pengertian Ibu Kota Negara adalah “satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara.”¹³ Ibu Kota Negara yang bernama nama Nusantara terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara yang luasnya 56.180 hektar sebagai kawasan inti IKN. Selain kawasan inti, terdapat juga kawasan pengembangan IKN seluas 199.962 hektar yang meliputi sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kertanegara, Kota Balikpapan, hingga perairan Selat Makassar.

e. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu bentuk negara yang terdiri atas wilayah yang luas dan tersebar dengan bermacam adat, suku, keyakinan serta budaya yang memiliki tujuan dasar menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Di Indonesia hanya ada satu pemerintahan pusat yang memegang otoritas tertinggi. Pemerintahan ini dipimpin oleh Presiden. Sementara itu, wilayah-wilayah administratif di bawahnya hanya menjalankan apa yang diperintahkan atau didelegasikan oleh pemerintah pusat.¹⁴



¹³ UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Pasal 1 Ayat (2).

¹⁴ <https://kumparan.com/berita-terkini/uraian-tentang-makna-negara-kesatuan-republik-indonesia-22Cef5vmNk1/4>, diakses pada Rabu, 20 Maret 2024 jam 19.30 WIB.

BAB II

LANDASAN PEMIKIRAN

7. Umum

Pada Bab II ini penulis akan menguraikan beberapa pasal yang dijadikan Landasan Pemikiran dalam penulisan Taskap ini. Landasan Pemikiran merupakan konsep pemikiran yang menjadi dasar argumentasi dan penjelasan dalam penulisan Taskap ini. Landasan pemikiran membantu memastikan bahwa penelitian dalam Taskap ini didasarkan pada pengetahuan yang sudah ada dan memberikan konteks yang kuat untuk menginterpretasikan hasil penelitian. Secara berurutan Landasan Pemikiran dalam Taskap ini terdiri dari beberapa pasal yaitu: Umum, Peraturan perundang-undangan, Data dan Fakta, Kerangka Teoritis, dan Lingkungan Strategis.

8. Peraturan Perundang-undangan

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. UU ini menegaskan bahwa pembangunan dan pengelolaan Ibu Kota Negara mengusung visi sebagai kota dunia yang inklusif, dengan tujuan utama mewujudkan kota ideal yang dapat menjadi contoh (*role model*) bagi pembangunan dan pengelolaan kota di Indonesia maupun di dunia.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022. Peraturan Pemerintah ini merupakan turunan dari Undang-Undang IKN yang menitikberatkan pada regulasi yang “mengatur tentang pendanaan dan pengelolaan anggaran untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN, serta penyelenggaraan pemerintah daerah khusus IKN”.
- c. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otoritas Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pasal 5 Ayat (2) menyebutkan bahwa “PNS dapat beralih status menjadi pegawai Otorita IKN atau penugasan dari instansinya. Untuk PNS yang beralih status menjadi pegawai Otorita IKN, maka yang bersangkutan berhenti atau berakhir masa baktinya”.

- d. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Peraturan Presiden ini mengatur tentang tahapan pembangunan IKN yang diperkirakan dapat diselesaikan pada 2045 dan penjabarannya adalah melalui tahapan persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara. Adapun 5 tahapan tersebut adalah tahap I tahun 2022-2024, Tahap II tahun 2025-2029, Tahap III tahun 2030-2034, Tahap IV tahun 2035-2039 dan Tahap V tahun 2040-2045.
- e. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022. Peraturan Presiden ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, yang mengatur Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Negara untuk periode 2022-2024. IKN direncanakan akan dibangun sebagai kota global yang berkelanjutan dengan konsep kota hutan, kota spons, dan kota cerdas.
- f. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di IKN. Pada Pasal 2 diatur bahwa perolehan tanah di IKN dilakukan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan dan/atau pengadaan tanah.
- g. Peraturan Kepala Otorita IKN Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja IKN. Pada Pasal 1 ayat (1) mengatur bahwa, "Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan lembaga setingkat kementerian yang bertanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden." Sedangkan pada ayat (2) diatur bahwa, "Otorita Ibu Kota Nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara."
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberiran Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di IKN. Pada Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa, "Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk memberikan kepastian,

kesempatan, dan partisipasi yang lebih besar kepada Pelaku Usaha dalam rangka percepatan pembangunan di Ibu Kota Nusantara.”

9. Data dan Fakta

- a. Komunitas Masyarakat Adat Balik Sepaku, Balik Pemaluan, Paser Maridan semakin terpinggirkan dengan adanya pembangunan IKN. Mereka terancam kehilangan wilayah adat. Masyarakat Adat seolah tidak memiliki ruang untuk menolak perencanaan pembangunan IKN di wilayah adat. Komunitas Masyarakat Adat Pemaluan Sepaku sering dibuat kebingungan dengan adanya pembangunan IKN, karena tiba-tiba kebun maupun rumah mereka masuk dalam areal pembangunan IKN tanpa pernah dimintakan persetujuan. Seperti yang dialami oleh Baniah, salah seorang Masyarakat Adat Pemaluan Sepaku. Ia sempat kebingungan melihat *drone* (pesawat tanpa awak) ada di areal kebun miliknya. Namun, Baniah tidak menghiraukan adanya *drone* tersebut. Ia hanya berpikir apakah *drone* ini sedang melakukan pemantaun terhadap kebunnya.¹⁵
- b. Data terbaru mengenai pembukaan lahan untuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) menunjukkan bahwa deforestasi di area tersebut cukup signifikan. Selama periode 2018 hingga 2021, sekitar 18 ribu hektar hutan telah dibuka, dengan tambahan 1.663 hektar yang dibuka antara tahun 2022 hingga pertengahan 2023. Ini mencakup lahan yang digunakan untuk berbagai proyek infrastruktur seperti jalan tol dan fasilitas pengendalian banjir di Sungai Sepaku. Proses pembebasan lahan untuk IKN telah mencapai sekitar 80%, dengan fokus pada area yang akan digunakan untuk proyek infrastruktur utama. Pemerintah telah menyediakan anggaran kompensasi sebesar USD 5,5 juta untuk penduduk yang terdampak, dengan opsi bagi mereka untuk menerima kompensasi atau relokasi. Namun, pengelolaan lahan ini telah menimbulkan kontroversi, terutama

¹⁵ <https://www.aman.or.id/story/masyarakat-adat-di-penajam-paser-utara-tergusur-oleh-pembangunan-ikn>. Diakses pada Jumat, 16 Agustus 2024 jam 13.30 WIB.

terkait dengan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat lokal, termasuk suku adat setempat.¹⁶

- c. Pada tahun 1980-an, proyek transmigrasi yang digagas pemerintah mulai memasuki wilayah tanah adat suku Dayak di sekitar IKN. Sebagian besar desa transmigrasi berkembang berkat program pemerintah, sementara desa-desa adat suku Dayak yang terletak di dalam hutan mengalami kesulitan untuk berkembang. Kondisi ini berpotensi mengganggu integrasi sosial di wilayah tersebut. Kenyataannya, suku Dayak dan beberapa suku lainnya yang merupakan etnis asli Kalimantan masih menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan mereka, terutama terkait konflik teritorial kehutanan dan wilayah adat.¹⁷
- d. Data menunjukkan bahwa sekitar 83 persen kegiatan masyarakat di Kalimantan Timur dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya masih didominasi oleh pendatang yang berasal dari suku Jawa, Bugis, Banjar, dan lainnya. Sementara itu, masyarakat asli dari suku Dayak, Paser, dan Kutai hanya mencakup sekitar 17 persen. Kondisi sosial semacam ini tidak hanya menghadirkan peluang bagi pengembangan Nusantara sebagai IKN di masa depan, tetapi juga menjadi tantangan serius untuk menciptakan harmoni dalam kehidupan masyarakat setempat, terutama dalam upaya mewujudkan integrasi sosial yang kuat di wilayah IKN demi menjaga keutuhan NKRI.¹⁸
- e. Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahry mengingatkan bahwa pembangunan IKN Nusantara akan mendatangkan persoalan serius dalam hal interaksi sosial, dimana tantangan integrasi sosial akan menguat karena adanya persaingan hidup antara warga masyarakat lokal dengan warga masyarakat pendatang. Karena itu para pemangku kepentingan IKN harus menyiapkan langkah antisipasi dan

¹⁶ <http://antaranews>. Diakses pada Jumat, 16 Agustus 2024 jam 13.55 WIB.

¹⁷ Norman Jiwan dan Marcus Colchester Kota Transmigrasi dan Orang Dayak Bekati'<https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/documents/Transmigration/Townships/BAH/.pdf>. Diunduh pada Senin, 29 April 2024 jam 18.00 WIB.

¹⁸ Demartoto, Argyo. Purnomo, Novel Adrian. (2022). *Strategi Integrasi Nasional Berbasis Pluralitas dan Multikulturalisme Dalam Menjaga Harmoni Sosial di Ibu Kota Negara Nusantara*. Balikpapan: Konferensi Nasional Sosiologi IX APSSI, 1-3 Juni 2022. h. 73-74.

menyiapkan lingkungan kehidupan masyarakat yang harmonis dan kondusif bagi terciptanya integrasi sosial di wilayah IKN.¹⁹

- f. Beberapa Tabel berikut adalah data tentang keadaan ekonomi dan sosial di Provinsi Kalimantan Timur, yang indikatornya meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), PDRB Perkapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Angka Kemiskinan.

Tabel 1
PDRB dengan Harga Berlaku
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur 2023

No.	Kab/Kota	PDRB (dalam juta Rp)
1	Kab. Paser	37.493.831,39
2	Kab. Kutai Barat	23.848.653,52
3	Kab. Kutai Kertanegara	135.406.045,93
4	Kab. Kutai Timur	104.663.188,97
5	Kab. Berau	31.570.052,94
6	Kab. Penajam Paser Utara	9.652.648,86
7	Kab. Mahakam Ulu	1.852.956,21
8	Kota Balikpapan	97.060.152,81
9	Kota Samarinda	53.604.333,00
10	Kota Bontang	42.633.628,07

Sumber: BPS Kaltim, 2023

Tabel 2
PDRB Perkapita dengan Harga Berlaku
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur 2023

¹⁹ <https://dprd.kaltimprov.go.id/post/interaksi-sosial-dinilai-bakal-jadi-masalah-serius-akibat-hadirnya-ikn-nusantara>. Diunduh pada Selasa, 30 April 2024 jam 14.30 WIB.

No.	Kab/Kota	PDRB Perkapita (dalam juta Rp)
1	Kab. Paser	208,43
2	Kab. Kutai Barat	222,08
3	Kab. Kutai Kartanegara	270,72
4	Kab. Kutai Timur	369,42
5	Kab. Berau	198,53
6	Kab. Penajam Paser Utara	87,26
7	Kab. Mahakam Ulu	100,94
8	Kota Balikpapan	201,64
9	Kota Samarinda	104,97
10	Kota Bontang	366,46

Sumber: BPS Kaltim, 2023

Tabel 3

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur 2023

No.	Kab/Kota	IPM
1	Kab. Paser	74,14
2	Kab. Kutai Barat	73,72
3	Kab. Kutai Kertanegara	75,30
4	Kab. Kutai Timur	74,98
5	Kab. Berau	76,21
6	Kab. Penajam Paser Utara	73,30
7	Kab. Mahakam Ulu	69,59
8	Kota Balikpapan	81,66

9	Kota Samarinda	82,32
10	Kota Bontang	81,56

Sumber: BPS Kaltim, 2023

Tabel 4
Angka Kemiskinan

Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur 2023

No.	Kab/Kota	Kemiskinan
1	Kab. Paser	9,11
2	Kab. Kutai Barat	9,72
3	Kab. Kutai Kertanegara	7,61
4	Kab. Kutai Timur	9,06
5	Kab. Berau	5,54
6	Kab. Penajam Paser Utara	6,97
7	Kab. Mahakam Ulu	11,38
8	Kota Balikpapan	2,31
9	Kota Samarinda	4,81
10	Kota Bontang	4,11

Sumber: BPS Kaltim, 2023

10. Kerangka Teoritis

a. Teori Optimalisasi

Optimalisasi adalah suatu ikhtiar yang dilakukan secara sungguh-sungguh untuk menemukan alternatif terbaik dari beberapa pilihan yang ada, sehingga efektifitas dan efisiensi dapat tercapai dalam penggunaan sumber daya yang tersedia. Menurut Winardi, dilihat dari perspektif usaha, optimalisasi dapat dimaknai sebagai ukuran yang menyebabkan

tercapainya tujuan yang diharapkan. Dengan demikian, optimalisasi merupakan usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan tujuan yang diharapkan atau dikehendaki.²⁰

b. Teori Integrasi Sosial

Integrasi merupakan sebuah proses penyatuan yang didasarkan pada aturan-aturan kelompok, di mana norma-norma tersebut berperan sebagai elemen pengendali perilaku individu. Integrasi dianggap sukses ketika anggota masyarakat merasa dapat saling membantu dan melengkapi dalam memenuhi kebutuhan. Ketercapaian integrasi sosial ditandai dengan adanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma sosial yang bertahan lama dan stabil.²¹ Konsep teori integrasi sosial juga mengasumsikan bahwa masyarakat hidup dan berkembang dalam sistem sosial yang mengutamakan keseimbangan (ekuilibrium). Menurut Emile Durkheim, integrasi sosial dapat terjadi jika terbangun rasa saling ketergantungan di antara kelompok masyarakat yang terspesialisasikan berdasarkan pada adanya rasa saling percaya, serta nilai yang secara fungsional saling bergantung dalam masyarakat yang beragam.²²

c. Teori Persatuan dan Kesatuan

Fred Isjwara menyatakan bahwa dibandingkan dengan negara federal atau konfederasi, bentuk negara kesatuan merupakan struktur pemerintahan paling solid, dikarenakan adanya kesatuan dan persatuan yang kuat di dalam negara kesatuan.²³ Bentuk negara kesatuan Republik Indonesia merupakan amanat konstitusi UUD NRI Tahun 1945. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yaitu, "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik".²⁴ Prinsip dasar dari negara kesatuan menekankan bahwa kekuasaan tertinggi atas

²⁰ Winardi. (2014). *Perencanaan dan Pengawasan Dalam Bidang Manajemen*. Jakarta: Mandar Maju.

²¹ Susanto, Astrid S. (1979). *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*. Bandung: Bina Cipta. h. 124.

²² Retnowati, "Agama, Konflik, dan Integrasi Sosial: Integrasi Sosial Pasca Konflik Situbundo," *Jurnal Analisa* Volume 21, No. 02 (Desember 2014): 194, diakses 21 April 2024, <https://media.neliti.com/media/publications/41938-IDagama-konflik-dan-integrasi-sosial-integrasi-sosial-pasca-konflik-situbondo.pdf>.

²³ Isjwara, Fred. (1974). *Pengantar Ilmu Politik*, Cetakan Kelima. Bandung: Binacipta. H.188.

²⁴ MPR RI. (2021). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Setjen MPR RI. H. 115.

seluruh urusan dana tatakelola negara dipegang oleh Pemerintah Pusat (*central government*), tanpa pendelegasian atau penyerahan wewenang kepada Pemerintah Daerah (*local government*).²⁵

d. Teori Kontingensi

Teori kontingensi adalah teori tentang kecocokan kepemimpinan, yang menekankan pentingnya menyesuaikan pemimpin dengan situasi yang tepat. Dikemukakan oleh Fiedler, teori ini menyatakan bahwa kinerja seorang pemimpin dipengaruhi oleh pemahamannya terhadap situasi yang ia pimpin. Teori ini berangkat dari filosofi bahwa setiap organisasi memiliki karakteristik unik dan menghadapi tantangan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, teori kontingensi berpendapat bahwa setiap situasi membutuhkan pendekatan kepemimpinan yang berbeda, dan setiap organisasi memerlukan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan karakteristiknya.²⁶

e. Teori Manajemen Resiko

Menurut Herman Darmawi manajemen risiko adalah suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi.²⁷ Tujuan utama manajemen risiko adalah untuk meminimalkan dampak negatif dari risiko yang terjadi dan memaksimalkan peluang yang bisa timbul dari situasi yang tidak pasti. Proses ini biasanya melibatkan beberapa langkah utama, yaitu identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi atau penilaian risiko, penanganan risiko, dan pemantauan serta review risiko secara berkala.

f. ***Politic, Economic, Social, Technology, Environment and Legal (PESTEL) Analysis***

²⁵ Handoyo, B. Hestu Cipto. (2003). *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. h. 91.

²⁶ chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://repo.darmajaya.ac.id/2490/6/BAB%20II.pdf. Diakses pada Rabu, 15 Agustus 2024 jam 15.40 WIB.

²⁷ Darmawi, Herman. (2006). *Manajemen Resiko*. Jakarta: Bina Aksara. h. 17.

Analisis PESTEL adalah metode sistematis yang digunakan dalam manajemen bisnis dan perencanaan strategis untuk memahami faktor-faktor makro eksternal yang dapat mempengaruhi suatu organisasi, perusahaan, atau proyek. PESTEL adalah singkatan dari enam kategori faktor eksternal: Politik (*Politic*), Ekonomi (*Economy*), Sosial (*Social*), Teknologi (*Technology*), Lingkungan (*Environment*), dan Hukum (*Legal*). Dalam analisis ini, data dikumpulkan dan dievaluasi untuk setiap kategori guna memahami dampaknya pada bisnis atau organisasi. Tujuan dari analisis PESTEL adalah membantu organisasi merancang strategi yang lebih efektif, mengidentifikasi peluang bisnis, mengelola risiko, dan merespons perubahan lingkungan dengan tepat.²⁸

11. Lingkungan Strategis

a. Lingkungan Global

Perang antara Rusia dan Ukraina yang berlangsung sejak 2014, dan semakin meningkat sejak invasi Rusia pada Februari 2022, memiliki dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan global. Meskipun konflik ini terjadi jauh dari Indonesia, dampaknya tidak dapat diabaikan, terutama ketika mempertimbangkan aspek ekonomi, politik, dan sosial yang mempengaruhi integrasi sosial di wilayah IKN di Kalimantan Timur. Dalam uraian ini, akan dijelaskan bagaimana lingkungan global yang dipengaruhi oleh perang Rusia dan Ukraina berdampak pada kelangsungan integrasi sosial di wilayah IKN, serta bagaimana hal ini berhubungan dengan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Perang Rusia dan Ukraina telah menyebabkan gangguan besar dalam rantai pasokan global, terutama dalam hal energi dan pangan. Rusia adalah salah satu eksportir terbesar minyak dan gas di dunia, sementara Ukraina adalah salah satu penghasil utama gandum. Sanksi ekonomi terhadap Rusia dan gangguan logistik di Ukraina telah menyebabkan

²⁸ <https://paydia.id/analisis-pestel-untuk-strategi-bisnis/Diakses> pada Rabu, 15 Agustus 2024 jam 15.20 WIB.

kenaikan harga energi dan pangan secara global. Bagi Indonesia, yang sebagian besar energinya masih bergantung pada impor, kenaikan harga energi ini dapat memicu inflasi, mengurangi daya beli masyarakat, dan meningkatkan ketidakpuasan sosial. Di wilayah IKN, yang sedang dalam tahap pembangunan, kenaikan biaya energi dan material konstruksi bisa menghambat proyek-proyek infrastruktur, memperlambat penyelesaian proyek, dan mengurangi kualitas hidup penduduk di sana. Keterlambatan atau penurunan kualitas pembangunan di IKN dapat memicu ketidakpuasan di kalangan masyarakat setempat, baik pendatang maupun masyarakat asli, yang bisa mengancam integrasi sosial dan kohesi masyarakat di wilayah tersebut.

Perang Rusia dan Ukraina juga mempengaruhi dinamika geopolitik global, dengan beberapa negara memihak Rusia dan lainnya mendukung Ukraina. Ketegangan ini dapat meningkatkan polarisasi politik di tingkat global, yang bisa merembet ke Indonesia. Polarisasi global ini bisa mempengaruhi opini publik di dalam negeri, termasuk di wilayah IKN, di mana masyarakat yang berasal dari latar belakang etnis dan budaya yang berbeda mungkin memiliki pandangan yang berbeda pula terkait perang ini. Jika polarisasi politik global ini tidak dikelola dengan baik, bisa timbul perpecahan di dalam masyarakat Indonesia, termasuk di wilayah IKN. Penduduk di wilayah IKN, yang terdiri dari berbagai suku dan budaya, mungkin terpengaruh oleh sentimen global ini, sehingga memperkuat identitas etnis dan regional mereka di atas identitas nasional. Hal ini berpotensi mengganggu integrasi sosial di wilayah IKN dan pada gilirannya dapat mengancam keutuhan NKRI.

Konflik global seperti perang Rusia dan Ukraina juga menunjukkan bagaimana globalisasi dapat mempengaruhi hubungan sosial di tingkat lokal. Globalisasi tidak hanya membawa kemajuan teknologi dan ekonomi, tetapi juga bisa membawa tantangan baru dalam hal identitas, budaya, dan integrasi sosial. Di wilayah IKN, yang akan menjadi pusat baru globalisasi di Indonesia, tantangan-tantangan ini akan semakin terasa. Masyarakat IKN yang terdiri dari beragam latar belakang etnis dan budaya perlu menghadapi tantangan untuk tetap terintegrasi dalam menghadapi

perubahan global. Jika tidak dikelola dengan baik, globalisasi bisa menyebabkan fragmentasi sosial, di mana kelompok-kelompok masyarakat lebih mementingkan identitas etnis atau regional mereka daripada identitas nasional.

Lingkungan strategis global yang demikian tentu dapat menjadi kendala dan sekaligus menghadirkan peluang bagi bangsa Indonesia dalam menyikapinya. Dengan demikian, dalam skala yang lebih luas kondisi ini jelas akan berpengaruh terhadap kegiatan pembangunan IKN Nusantara, di Kalimantan Timur.

b. Lingkungan Regional

Konflik di Laut Cina Selatan (LCS) adalah salah satu isu regional paling signifikan di kawasan Asia Tenggara, yang melibatkan klaim tumpang tindih oleh beberapa negara, termasuk Cina, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Taiwan. LCS adalah wilayah strategis dengan cadangan sumber daya alam yang melimpah dan jalur pelayaran internasional yang sangat penting. Ketegangan di wilayah ini telah menimbulkan berbagai dampak, termasuk peningkatan aktivitas militer dan ketidakstabilan politik di kawasan tersebut. Konflik ini tidak hanya berdampak pada negara-negara yang terlibat langsung, tetapi juga mempengaruhi negara-negara di sekitarnya, termasuk Indonesia. Dalam konteks Indonesia, konflik LCS memiliki pengaruh penting terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk integrasi sosial di wilayah IKN Nusantara di Kalimantan Timur. IKN, sebagai pusat pemerintahan dan simbol keutuhan NKRI, menghadapi tantangan yang kompleks dalam menjaga integrasi sosial di tengah dinamika regional yang dipengaruhi oleh konflik LCS.

Konflik di LCS berpotensi menimbulkan ketidakstabilan regional yang berdampak langsung pada keamanan nasional Indonesia. Peningkatan aktivitas militer di LCS oleh negara-negara yang terlibat dalam konflik ini dapat memicu ketegangan yang lebih luas, bahkan mengarah pada konfrontasi militer di kawasan. Sebagai negara yang berbatasan langsung

dengan LCS dan memiliki kepentingan strategis di wilayah tersebut, Indonesia harus menghadapi potensi ancaman keamanan ini. Wilayah IKN yang terletak di Kalimantan Timur, meskipun tidak berada langsung di kawasan LCS, tetap bisa terdampak oleh ketidakstabilan regional ini. Ketidakpastian keamanan dapat memengaruhi persepsi masyarakat di wilayah IKN tentang stabilitas negara, yang dapat berdampak pada integrasi sosial. Masyarakat mungkin merasa cemas tentang kemungkinan ancaman eksternal, yang dapat memicu perpecahan dan disintegrasi sosial jika tidak dikelola dengan baik.

Konflik di LCS juga berdampak pada perekonomian regional, terutama mengingat pentingnya LCS sebagai jalur perdagangan internasional. Ketidakstabilan di kawasan ini dapat mengganggu arus perdagangan dan investasi, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bagi IKN, yang masih dalam tahap pembangunan, stabilitas ekonomi sangat penting untuk memastikan kelancaran pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat setempat. Jika konflik di LCS mengganggu perdagangan internasional dan investasi asing, Indonesia bisa menghadapi penurunan investasi di proyek-proyek besar seperti IKN. Hal ini dapat memperlambat pembangunan dan menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat lokal yang dapat merusak integrasi sosial. Kurangnya kesempatan ekonomi yang adil dan merata dapat memperdalam ketimpangan antara pendatang dan penduduk asli di IKN yang bisa memicu gesekan sosial.

Dalam menghadapi potensi ancaman dari konflik di LCS, Indonesia perlu memperkuat kebijakan pertahanan dan keamanannya, termasuk di wilayah IKN. Pemerintah harus memastikan bahwa IKN dilengkapi dengan infrastruktur pertahanan yang memadai untuk menghadapi berbagai kemungkinan ancaman, baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Keberadaan infrastruktur pertahanan yang kuat di IKN dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat setempat, yang penting untuk menjaga integrasi sosial. Jika masyarakat merasa terlindungi dari ancaman eksternal, mereka lebih cenderung untuk fokus pada pembangunan

komunitas yang harmonis. Namun, jika ada kekhawatiran tentang keamanan nasional, hal ini bisa memicu ketidakstabilan sosial di IKN yang berpotensi merusak keutuhan NKRI.

Lingkungan strategis regional yang demikian tentu dapat menjadi kendala dan sekaligus menghadirkan peluang bagi bangsa Indonesia dalam menyikapinya. Dengan demikian, dinamika lingkungan regional ini akan memberikan pengaruh yang signifikan bagi prospek pembangunan IKN di Kalimantan Timur, baik secara langsung maupun tidak langsung.

c. Lingkungan Nasional

Disamping dinamika geopolitik global dan regional, aspek dinamika politik nasional dapat menjadi kendala dan sekaligus menghadirkan peluang bagi pemerintah Indonesia dalam menyikapinya. Artinya, dinamika lingkungan nasional ini juga mempunyai pengaruh yang signifikan dalam proses pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Selain itu, dinamika lingkungan nasional juga memiliki pengaruh terhadap perubahan sosial, khususnya terkait dengan optimalisasi integrasi sosial di wilayah IKN guna menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dapat diuraikan melalui aspek-aspek sebagai berikut:

1) Geografi

Dari perspektif geografi, pemilihan lokasi IKN di Kalimantan Timur memiliki beberapa keuntungan yang dapat memperkuat integrasi sosial di Indonesia. Kalimantan Timur berada di tengah-tengah wilayah Indonesia, baik dari sisi barat ke timur maupun dari sisi utara ke selatan. Posisi ini menjadikan IKN lebih terjangkau dari berbagai daerah di Indonesia dibandingkan Jakarta yang berada di ujung barat. Dengan demikian, IKN dapat menjadi pusat gravitasi baru yang lebih dekat dan lebih mudah diakses oleh seluruh provinsi di Indonesia. Hal ini dapat memperkuat rasa kesatuan dan kebersamaan di antara warga negara dari berbagai daerah, karena IKN lebih mencerminkan posisi sentral dan menyatukan seluruh wilayah Indonesia.

Sebagai ibu kota baru, IKN di Kalimantan Timur berfungsi sebagai jembatan antara wilayah barat dan timur Indonesia. Hal ini penting karena selama ini pembangunan dan perkembangan ekonomi lebih terkonsentrasi di Jawa, yang seringkali menimbulkan kesenjangan antara wilayah barat dan timur. Dengan penempatan IKN di Kalimantan Timur, diharapkan terjadi pemerataan pembangunan dan ekonomi yang lebih baik di seluruh Indonesia, yang akan memperkuat integrasi sosial dan mengurangi potensi ketidakpuasan di daerah yang merasa tertinggal.

Jawa, khususnya Jakarta, saat ini mengalami tekanan yang luar biasa dari segi populasi dan infrastruktur. Dengan memindahkan IKN ke Kalimantan Timur, beban tersebut dapat berkurang, memungkinkan Jawa untuk berkembang lebih berkelanjutan. Ini juga membuka peluang bagi pembangunan daerah di luar Jawa, yang akan mengurangi kesenjangan antar wilayah dan memperkuat integrasi nasional.

Aspek geografi IKN di Kalimantan Timur memberikan banyak keuntungan strategis dalam konteks nasional. Letaknya yang sentral, peran sebagai penghubung antar-wilayah, keberagaman budaya, serta potensi pembangunan yang lebih merata, semuanya berkontribusi pada upaya optimalisasi integrasi sosial guna menjaga keutuhan NKRI. Dengan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan, IKN dapat menjadi simbol persatuan dan kekuatan nasional yang baru serta memperkuat ikatan sosial di seluruh penjuru Indonesia.

2) Demografi

Aspek demografi ini memegang peranan penting dalam mengoptimalkan integrasi sosial guna menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). IKN akan menjadi magnet baru bagi masyarakat dari seluruh Indonesia yang datang untuk bekerja, tinggal, dan berkontribusi dalam pembangunan ibu kota baru. Penduduk IKN akan terdiri dari berbagai etnis dan budaya, mencerminkan miniatur Indonesia yang multikultural. Interaksi antara

berbagai kelompok etnis ini diharapkan menciptakan sinergi positif, di mana keberagaman dijadikan kekuatan untuk memperkuat persatuan. Kehadiran berbagai suku bangsa dari seluruh penjuru Indonesia akan memperkokoh identitas nasional, mendorong terciptanya masyarakat yang lebih inklusif dan toleran.

Salah satu masalah demografi terbesar di Indonesia adalah konsentrasi populasi yang sangat tinggi di Pulau Jawa, khususnya di Jakarta. Dengan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur, terjadi penyebaran populasi yang lebih merata ke luar Jawa. Hal ini penting untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah barat dan timur Indonesia. Penyebaran populasi yang lebih merata akan membantu mengurangi tekanan di Jawa, sambil memberikan kesempatan bagi daerah di luar Jawa untuk berkembang dan berkontribusi lebih besar dalam perekonomian nasional. Ini akan mendorong integrasi sosial yang lebih baik, karena pembangunan yang lebih merata cenderung mengurangi ketimpangan dan ketidakpuasan yang dapat mengancam keutuhan NKRI.

Demografi IKN yang mencakup berbagai lapisan masyarakat memberikan peluang ekonomi yang lebih luas dan beragam. Dengan adanya pembangunan infrastruktur yang masif, serta penempatan pusat pemerintahan di wilayah baru, akan tercipta berbagai lapangan pekerjaan dan peluang usaha bagi masyarakat dari berbagai daerah. Ini akan menarik tenaga kerja dari seluruh Indonesia, menciptakan masyarakat yang dinamis dan beragam secara sosial dan ekonomi. Kesempatan ekonomi yang lebih luas ini tidak hanya akan mengurangi tingkat pengangguran, tetapi juga memperkuat integrasi sosial melalui kolaborasi dan interaksi antar kelompok masyarakat yang berbeda.

IKN di Kalimantan Timur akan menjadi simbol baru identitas nasional yang lebih inklusif dan beragam. Dengan menjadikan wilayah yang jauh dari pusat kekuasaan tradisional sebagai ibu kota, Indonesia menegaskan bahwa semua wilayah dan semua kelompok etnis memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara. Identitas nasional yang kuat ini penting untuk menjaga keutuhan NKRI, karena masyarakat di seluruh Indonesia merasa terwakili dan dihargai dalam konteks nasional yang lebih luas.

3) Sumber Kekayaan Alam

Aspek sumber daya alam ini memiliki dampak signifikan dalam mengoptimalkan integrasi sosial guna menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kalimantan Timur dikenal sebagai salah satu daerah dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, terutama dalam sektor pertambangan (batubara, minyak, dan gas), kehutanan, serta perkebunan. Dengan menjadikan Kalimantan Timur sebagai pusat pemerintahan, Indonesia dapat memanfaatkan sumber daya ini untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan ekonomi di IKN secara berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya alam secara optimal akan menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, yang pada gilirannya akan menarik penduduk dari berbagai daerah untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN. Hal ini membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah, memperkuat integrasi sosial, dan memupuk rasa kebersamaan dalam membangun masa depan bersama.

Dalam pengelolaan sumber daya alam di IKN, pendekatan berbasis keberlanjutan sangat penting. Dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, pemerintah dapat memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam tidak merusak ekosistem yang ada, yang penting bagi kehidupan masyarakat lokal, termasuk suku-suku asli seperti Dayak. Pembangunan yang ramah lingkungan akan menciptakan model integrasi sosial yang harmonis, di mana pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan pelestarian budaya dan lingkungan. Ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat lokal terhadap pemerintah dan mengurangi potensi disintegrasi sosial yang bisa timbul akibat perebutan sumber daya alam.

Sumber daya alam yang melimpah di IKN juga memberikan peluang bagi diversifikasi ekonomi. Alih-alih bergantung pada sektor-sektor tradisional seperti pertambangan, IKN dapat menjadi pusat inovasi dengan memanfaatkan sumber daya alam untuk pengembangan energi terbarukan, ekowisata, dan industri kreatif. Diversifikasi ekonomi ini akan menciptakan peluang baru bagi berbagai kelompok masyarakat, termasuk generasi muda dan pendatang dari seluruh Indonesia, yang akan meningkatkan integrasi sosial dan memperkuat kohesi nasional. Dengan mengurangi ketergantungan pada satu sektor ekonomi, IKN juga akan lebih tahan terhadap fluktuasi ekonomi global, yang pada akhirnya membantu menjaga stabilitas nasional dan keutuhan NKRI.

Dalam perspektif lingkungan strategis nasional, potensi kekayaan alam Kalimantan Timur dapat memberikan kontribusi besar bagi kelancaran pembangunan IKN Nusantara. Sumber daya energi, mineral, kehutanan, dan perikanan dapat mendukung pembangunan infrastruktur, penyediaan energi, serta pengembangan ekonomi lokal. Namun, pemanfaatan kekayaan alam ini harus dilakukan dengan prinsip berkelanjutan, untuk memastikan bahwa pembangunan IKN tidak merusak lingkungan dan tetap mendukung kesejahteraan dalam jangka panjang bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat lokal.

4) Ideologi

Pancasila, sebagai dasar ideologi negara, memainkan peran sentral dalam memperkuat integrasi sosial di IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Setiap sila dalam Pancasila mencerminkan nilai-nilai yang penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pancasila, dengan nilai-nilai universalnya, menjadi landasan kuat dalam mengoptimalkan integrasi sosial di wilayah IKN guna menjaga keutuhan NKRI, dan memperkuat identitas nasional di tengah tantangan globalisasi dan dinamika sosial yang kompleks.

Ideologi Pancasila memiliki arti penting yang sangat besar dalam kelancaran dan prospek pembangunan IKN Nusantara. Pancasila, sebagai ideologi negara, berperan sebagai fondasi moral, etika, dan kebijakan dalam pembangunan IKN Nusantara. Nilai-nilai Pancasila membantu memastikan bahwa pembangunan ibu kota baru ini tidak hanya berfokus pada aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, persatuan, dan keberlanjutan. Dengan demikian, Pancasila menjadi landasan yang kokoh untuk mewujudkan IKN sebagai simbol kemajuan Indonesia yang berakar kuat pada identitas dan nilai-nilai bangsa.

Dengan mempromosikan nilai-nilai ideologi Pancasila ini, masyarakat di wilayah IKN dapat membangun kesadaran akan pentingnya arti persatuan dan kesatuan dalam harmoni kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila.

5) Politik

Saat ini kondisi politik nasional belum sepenuhnya stabil karena sedang menghadapi proses penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah secara serentak pada November 2024 yang akan datang. Pilkada serentak sangat penting dan strategis bagi kehidupan politik nasional serta kesinambungan pembangunan bangsa. Memang proses penyelesaian sengketa perselisihan hasil Pemilu Pilpres 2024 sudah selesai di Mahkamah Konstitusi (MK) yang ditandai dengan pembacaan putusan MK pada tanggal 22 April 2024 dan KPU kemudian menetapkan pemenang Pilpres 2024, yakni pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih pada tanggal 24 April 2024 lalu. Kemudian penyelesaian sengketa perselisihan hasil Pemilu Legislatif 2024 pun telah selesai di MK dan diputuskan sebanyak 8 partai politik yang lolos *parliamentary threshold* 4 persen dan mengirimkan wakilnya di DPR RI yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya,

Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasional Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin periode 2019-2024 akan mengakhiri masa bhaktinya pada tanggal 20 Oktober 2024 yang akan datang, seiring dengan pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029. Tentunya kita semua segenap komponen bangsa harus berkontribusi agar proses alih kekuasaan dan transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden Prabowo Subianto dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan aman. Selain itu, kondisi politik nasional harus tetap dijaga agar selalu kondusif sehingga proses pelaksanaan pembangunan IKN Nusantara dapat berlangsung lancar sesuai rencana.

6) **Ekonomi**

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur membawa dampak signifikan dalam mengoptimalkan integrasi sosial guna menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui berbagai aspek ekonomi. Salah satu tujuan utama pemindahan IKN adalah mengurangi kesenjangan ekonomi antara wilayah barat dan timur Indonesia. Selama ini, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi terpusat di Pulau Jawa, khususnya di Jakarta. Dengan pembangunan IKN, diharapkan akan terjadi distribusi ekonomi yang lebih merata, yang dapat mengurangi ketimpangan dan memperkuat ikatan sosial di seluruh wilayah Indonesia. Pemerataan ini akan menciptakan kesempatan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat lokal dan pendatang, sehingga meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat integrasi sosial.

Pembangunan IKN akan menciptakan banyak lapangan kerja, baik dalam sektor konstruksi, jasa, maupun industri lainnya. Peningkatan aktivitas ekonomi ini akan menarik tenaga kerja dari berbagai daerah di Indonesia, mendorong interaksi antar kelompok

etnis dan budaya. Kondisi ini dapat memperkuat integrasi sosial di IKN, karena adanya tujuan bersama dalam pembangunan ekonomi.

IKN memiliki potensi untuk menjadi pusat ekonomi baru yang tidak hanya bergantung pada sektor-sektor tradisional, tetapi juga mengembangkan industri kreatif, teknologi, dan pariwisata. Diversifikasi ekonomi ini akan memperluas basis ekonomi, mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu, dan menciptakan lingkungan ekonomi yang inklusif. Dengan demikian, IKN dapat menjadi model pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, yang mendorong keseimbangan ekonomi dan sosial.

IKN akan menjadi simpul baru dalam jaringan ekonomi nasional, memperkuat konektivitas antarwilayah. Ini akan memfasilitasi distribusi barang dan jasa, serta memperkuat keterkaitan ekonomi antar daerah, yang penting untuk menjaga stabilitas dan keutuhan NKRI.

Prospek ekonomi Indonesia pasca Pemilu 2024 akan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk stabilitas politik, kebijakan ekonomi pemerintahan baru, dan dinamika global. Secara keseluruhan, jika pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mampu mengelola ekonomi dengan baik, Indonesia memiliki potensi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang solid pasca Pemilu 2024, didukung oleh stabilitas politik, pembangunan infrastruktur, dan diversifikasi ekonomi.

7) Sosial Budaya

Aspek sosial budaya dalam perspektif nasional sangat penting untuk mengoptimalkan integrasi sosial di wilayah IKN guna menjaga keutuhan NKRI. Integrasi sosial di IKN memerlukan perhatian khusus terhadap keberagaman budaya, suku, dan agama yang ada di Indonesia. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mendorong interaksi yang positif antar berbagai kelompok masyarakat, serta mempromosikan saling pengertian dan toleransi.

Dalam konteks ini, penting untuk mengembangkan program-program yang mendukung pelestarian budaya lokal sambil mendorong inklusi dan kolaborasi antar masyarakat. Misalnya, kegiatan budaya, festival, dan pendidikan multikultural dapat berperan sebagai jembatan untuk mempererat hubungan antar kelompok. Selain itu, pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menciptakan kebijakan yang adil dan merata, serta membangun infrastruktur yang mendukung keragaman. Dengan memperkuat nilai-nilai persatuan dan kesatuan serta menghormati perbedaan, integrasi sosial di IKN dapat terwujud, yang pada gilirannya akan memperkuat keutuhan NKRI dan memastikan bahwa setiap warga negara merasa dihargai dan terlibat dalam pembangunan negara.

Dalam perspektif lingkungan strategis nasional, keragaman sosial budaya masyarakat Kalimantan Timur yang terdiri dari berbagai macam suku dan agama merupakan aset berharga bagi Indonesia dalam mengoptimalkan integrasi sosial guna menjaga keutuhan NKRI. Melalui penghargaan terhadap keberagaman, promosi toleransi, dan partisipasi aktif dalam pembangunan, Kalimantan Timur dapat menjadi model bagi seluruh Indonesia dalam menciptakan masyarakat yang bersatu dalam keberagaman, yang pada giliran berikutnya dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

8) **Pertahanan dan Keamanan**

Keberadaan sistem pertahanan dan keamanan yang kuat di IKN dapat menciptakan lingkungan yang stabil, aman dan penting untuk integrasi sosial yang harmonis. Penguatan sistem pertahanan harus mencakup strategi yang melibatkan semua elemen masyarakat untuk mencegah ancaman dari dalam maupun luar negeri. Hal ini termasuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi disintegrasi sosial dan ancaman terorisme yang dapat mempengaruhi kestabilan sosial.

Pendekatan keamanan yang berbasis komunitas penting untuk membangun rasa aman dan kepercayaan di kalangan warga. Dengan

melibatkan masyarakat dalam program keamanan, seperti patroli lingkungan dan pelatihan keamanan, diharapkan dapat mempererat hubungan antar kelompok dan mencegah potensi gesekan dan disintegrasi sosial.

Integrasi antar lembaga pertahanan dan keamanan dengan pemerintah daerah dan masyarakat harus diperkuat untuk memastikan respons yang cepat dan efektif terhadap isu-isu yang muncul. Dengan sistem Hankam yang solid dan inklusif, stabilitas sosial dapat terjaga, sehingga keutuhan NKRI dapat dipertahankan dan integrasi sosial di IKN dapat terwujud.

Posisi IKN Nusantara di Kalimantan Timur memiliki keunggulan strategis dari sisi pertahanan dan keamanan nasional. Lokasi yang sentral dan relatif aman dari bencana alam, serta kesempatan untuk membangun infrastruktur pertahanan yang modern, menjadikan IKN sebagai pilihan yang tepat untuk pusat pemerintahan baru Indonesia. Selain itu, pemindahan ibu kota ini juga berkontribusi pada penguatan integrasi nasional dan peningkatan kontrol serta pengawasan terhadap seluruh wilayah Indonesia, yang esensial bagi keutuhan dan keamanan NKRI.



BAB III

PEMBAHASAN

12. Umum

Pada Bab III ini penulis akan menguraikan beberapa pasal yang dijadikan pembahasan dalam penulisan Taskap ini. Bab pembahasan ini adalah bagian Taskap di mana penulis menganalisis dan menginterpretasikan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dalam bab ini, penulis menjelaskan makna dari data dan fakta yang dikumpulkan, didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada, menghubungkannya dengan kerangka teori, menjelaskan bagaimana hasil penelitian untuk menjawab pertanyaan kajian, dan bagaimana kontribusinya terhadap pengetahuan pada bidang yang diteliti penulis. Bab III ini terdiri atas beberapa pasal, yaitu Umum, Potensi Disintegrasi Sosial di Wilayah IKN yang Berdampak Terhadap Keutuhan NKRI, Hambatan/Tantangan Pelaksanaan Integrasi Sosial di Wilayah IKN, dan Upaya Optimalisasi Integrasi Sosial di Wilayah IKN Guna Menjaga Keutuhan NKRI.

13. Potensi Disintegrasi Sosial di Wilayah IKN yang Berdampak Terhadap Keutuhan NKRI

Dalam pembahasan pasal ini yang merupakan jawaban atas pertanyaan kajian pertama Taskap, penulis akan menguraikan potensi disintegrasi sosial di wilayah IKN yang berdampak terhadap keutuhan NKRI. Pembahasan ini menggunakan pendekatan *PESTEL Analysis*, artinya menganalisis secara mendalam potensi disintegrasi sosial di wilayah IKN yang berdampak terhadap keutuhan NKRI dalam perspektif Politik (*Politic*), Ekonomi (*Economy*), Sosial (*Social*), Teknologi (*Technology*), Lingkungan (*Environment*), dan Hukum (*Legal*) atau disingkat PESTEL. Dengan demikian, *PESTEL Analysis* ini akan memperjelas pembahasan dan melengkapi kerangka teoritis sebagaimana yang telah disebutkan dalam Bab II terdahulu.

Potensi disintegrasi sosial di wilayah IKN yang berdampak terhadap keutuhan NKRI manakala ditinjau dengan analisis PESTEL (Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi, Lingkungan, dan Hukum) dapat memperdalam pembahasan

dengan perspektif yang bersifat melengkapi kerangka teoritis yang telah disebutkan pada Bab II. Karena analisis PESTEL ini memberikan penjelasan tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan potensi disintegrasi sosial di wilayah IKN yang berdampak terhadap keutuhan NKRI. Karena itu, penting untuk mengatasi secara proaktif masalah politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum yang menjadi potensi disintegrasi sosial di wilayah IKN, serta melibatkan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan IKN untuk meminimalisasi dampak disintegrasi sosial di wilayah IKN guna menjaga keutuhan NKRI.

Secara lebih rinci penulis menyampaikan analisis PESTEL terkait potensi disintegrasi sosial di wilayah IKN yang berdampak terhadap keutuhan NKRI sebagai berikut:

a. Politik

Aspek politik berfokus pada kebijakan pemerintah, stabilitas politik, dan hubungan internasional yang mempengaruhi pembangunan IKN. Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur adalah keputusan politik besar yang bertujuan untuk mendistribusikan pembangunan nasional agar lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. Namun, keputusan ini bisa memicu potensi disintegrasi sosial di wilayah IKN yang berdampak terhadap keutuhan NKRI jika tidak dikelola dengan baik.

Dilihat dari analisis aspek politik, potensi disintegrasi sosial di wilayah IKN yang berdampak terhadap keutuhan NKRI adalah:

- 1) Ketidakpuasan Masyarakat Lokal. Salah satu ancaman utama adalah potensi ketidakpuasan di kalangan masyarakat lokal yang merasa diabaikan atau tidak mendapatkan manfaat yang seimbang dari pembangunan proyek IKN di Kalimantan Timur. Jika masyarakat lokal merasa terpinggirkan atau tidak terlibat dalam proses pembangunan, hal ini dapat memicu ketegangan yang berujung pada disintegrasi sosial yang dapat mengancam keutuhan NKRI.
- 2) Ancaman Politik Identitas. Wilayah Kalimantan Timur dihuni oleh berbagai kelompok etnis dengan identitas yang kuat. Pembangunan

IKN bisa memperuncing konflik identitas jika kebijakan pemerintah tidak sensitif terhadap keberagaman budaya dan adat istiadat masyarakat lokal. Hal ini dapat memperburuk polarisasi dan meningkatkan risiko konflik horizontal.

- 3) Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Pemandangan IKN ke Kalimantan Timur juga mengangkat isu mengenai desentralisasi dan otonomi daerah. Ada kekhawatiran bahwa penempatan pusat pemerintahan di Kalimantan Timur dapat mengurangi otonomi daerah setempat, yang pada giliran selanjutnya bisa memicu gerakan separatis atau tuntutan untuk lebih banyak otonomi bagi daerah setempat.

b. Ekonomi

Aspek ekonomi mencakup pertumbuhan ekonomi, distribusi sumber daya, dan lapangan kerja. Pembangunan IKN di Kalimantan Timur diharapkan membawa dampak positif dalam bidang ekonomi, namun juga berpotensi menciptakan kesenjangan dan ketidakstabilan sosial jika tidak direncanakan secara matang.

Dilihat dari analisis aspek ekonomi, potensi disintegrasi sosial di wilayah IKN yang berdampak terhadap keutuhan NKRI adalah:

- 1) Kesenjangan Ekonomi. Meskipun IKN diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur, tetapi ada risiko bahwa manfaat ekonomi hanya akan dirasakan oleh segelintir elit atau investor dari luar daerah, sementara masyarakat lokal tetap berada dalam jeratan kemiskinan. Kesenjangan ekonomi yang lebar ini menyulut ketidakpuasan sosial dan bisa memicu potensi disintegrasi sosial di wilayah IKN yang berdampak terhadap keutuhan NKRI.
- 2) Migrasi dan Pengangguran. Pembangunan IKN akan menarik tenaga kerja dari berbagai daerah di Indonesia untuk bermigrasi ke IKN di Kalimantan Timur. Namun, tanpa perencanaan yang baik, migrasi massal ini bisa memicu persaingan di pasar kerja lokal, meningkatkan pengangguran, dan memicu terjadinya gesekan sosial antara pendatang dan masyarakat lokal.

- 3) Distribusi Sumber Daya. Ada kekhawatiran bahwa pembangunan IKN akan memfokuskan alokasi sumber daya nasional di satu wilayah, sehingga mengurangi investasi di daerah lain. Ini bisa memperparah ketimpangan regional dan memicu kecemburuan antar daerah yang berpotensi mengganggu rasa persatuan dan kesatuan nasional dalam bingkai NKRI.

c. Sosial

Aspek sosial mencakup demografi, budaya, dan struktur sosial. Perubahan sosial yang drastis akibat pembangunan IKN di Kalimantan Timur dapat mempengaruhi dinamika sosial di wilayah tersebut, berpotensi memicu disintegrasi sosial yang dapat mengancam keutuhan NKRI.

Dilihat dari analisis aspek sosial, potensi disintegrasi sosial di wilayah IKN yang berdampak terhadap keutuhan NKRI adalah:

- 1) Perubahan Demografis. Pembangunan IKN Nusantara akan mengubah komposisi demografis Kalimantan Timur dengan masuknya pendatang dari berbagai daerah. Hal ini bisa menimbulkan ketegangan sosial jika tidak ada upaya untuk melakukan optimalisasi integrasi sosial yang efektif antara masyarakat pendatang dan penduduk lokal.
- 2) Budaya dan Identitas Lokal. Kalimantan Timur memiliki budaya dan adat istiadat yang kuat. Pembangunan IKN yang tidak menghormati atau tidak mengakomodasi budaya lokal dapat memicu resistensi dari masyarakat adat, yang merasa identitas mereka terancam oleh arus modernisasi dan migrasi sehingga berpotensi memicu disintegrasi sosial yang dapat mengancam keutuhan NKRI.
- 3) Disparitas Sosial. Masuknya investor dan pendatang dengan status ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat lokal berpotensi meningkatkan disparitas sosial di wilayah IKN. Ketidakadilan sosial yang dirasakan oleh masyarakat lokal dapat memicu ketidakpuasan dan berpotensi memicu disintegrasi sosial yang dapat mengancam keutuhan NKRI.

d. Teknologi

Aspek teknologi berkaitan dengan kemajuan teknologi dan inovasi yang digunakan dalam pembangunan IKN. Meskipun teknologi dapat mempercepat pembangunan, tetapi ada risiko sosial yang perlu diperhatikan.

Dilihat dari analisis aspek teknologi, potensi disintegrasi sosial di wilayah IKN yang berdampak terhadap keutuhan NKRI adalah:

- 1) Kesenjangan Digital. Pemanfaatan teknologi canggih dalam pembangunan IKN bisa menciptakan kesenjangan digital antara masyarakat lokal dan pendatang. Jika masyarakat lokal tidak dibekali dengan keterampilan yang memadai untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital, mereka bisa merasa terpinggirkan.
- 2) Ketergantungan pada Teknologi. Ketergantungan yang tinggi pada teknologi dalam operasional pemerintahan dan infrastruktur kota di IKN dapat menimbulkan risiko jika masyarakat lokal belum siap atau tidak memiliki akses yang setara terhadap teknologi tersebut. Hal ini bisa memperburuk ketimpangan sosial dan berpotensi memicu disintegrasi sosial yang dapat mengancam keutuhan NKRI.

e. Lingkungan

Aspek lingkungan berkaitan dengan dampak pembangunan IKN terhadap lingkungan alam di Kalimantan Timur. Pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan bisa memicu krisis sosial yang berdampak pada stabilitas nasional.

Dilihat dari analisis aspek lingkungan, potensi disintegrasi sosial di wilayah IKN yang berdampak terhadap keutuhan NKRI adalah:

- 1) Kerusakan Lingkungan. Pembangunan IKN berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan seperti deforestasi, polusi, dan kerusakan ekosistem. Jika masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya alam untuk mata pencaharian mereka terdampak, hal ini bisa memicu

ketegangan antara pemerintah dan masyarakat dan berpotensi memicu disintegrasi sosial yang dapat mengancam keutuhan NKRI.

- 2) Pemandangan Komunitas. Pembangunan IKN bisa menyebabkan pemindahan komunitas lokal dari tanah adat mereka. Pemindahan paksa atau tanpa kompensasi yang adil dapat memicu resistensi sosial yang kuat dan menjadi sumber ketidakstabilan sehingga berpotensi memicu disintegrasi sosial yang dapat mengancam keutuhan NKRI.

f. Hukum

Aspek hukum mencakup regulasi, hak asasi manusia, dan penegakan hukum. Kepastian hukum sangat penting untuk memastikan pembangunan IKN berjalan lancar dan adil, serta mencegah potensi disintegrasi sosial yang dapat mengancam keutuhan NKRI.

Dilihat dari analisis aspek hukum, potensi disintegrasi sosial di wilayah IKN yang berdampak terhadap keutuhan NKRI adalah:

- 1) Kepastian Hukum. Ketidadaan kepastian hukum terkait hak atas tanah, izin pembangunan, dan kompensasi bagi masyarakat yang terdampak pembangunan IKN bisa menjadi potensi disintegrasi sosial yang dapat mengancam keutuhan NKRI. Masyarakat lokal yang merasa hak-hak mereka tidak dilindungi mungkin akan melakukan perlawanan, baik melalui jalur hukum maupun tindakan langsung.
- 2) Penegakan Hukum. Penegakan hukum yang lemah atau tidak adil, terutama dalam menangani sengketa tanah dan pelanggaran hak asasi manusia, dapat memicu ketidakpuasan sosial yang berpotensi mengarah pada disintegrasi sosial. Masyarakat yang merasa diperlakukan tidak adil mungkin akan mencari jalan lain untuk menyalurkan ketidakpuasan mereka, termasuk tindakan yang dapat mengancam stabilitas nasional.

Untuk memudahkan pemahaman terhadap analisis PESTEL di atas, Tabel 5 berikut ini akan merangkum penjelasan faktor-faktor yang mempengaruhi potensi disintegrasi sosial di wilayah IKN yang berdampak terhadap keutuhan

NKRI disertai dengan isu, uraian aspek, solusi, dan rekomendasi bagi pemerintah pusat (Badan Otorita IKN), pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan para pemangku kepentingan pembangunan IKN.

Tabel 5
Analisis PESTEL
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Potensi Disintegrasi Sosial di IKN

ISU	URAIAN ASPEK	SOLUSI	REKOMENDASI
Politik	<p>1. Ketidakpuasan Masyarakat Lokal. Salah satu ancaman utama adalah potensi ketidakpuasan di kalangan masyarakat lokal yang merasa diabaikan atau tidak mendapatkan manfaat yang seimbang dari pembangunan proyek IKN di Kalimantan Timur. Jika masyarakat lokal merasa terpinggirkan atau tidak terlibat dalam proses pembangunan, hal ini dapat memicu ketegangan yang berujung pada disintegrasi sosial yang dapat mengancam keutuhan NKRI.</p> <p>2. Ancaman Politik Identitas. Wilayah Kalimantan Timur dihuni oleh berbagai kelompok etnis dengan identitas yang kuat. Pembangunan IKN bisa memperuncing konflik identitas jika kebijakan pemerintah tidak sensitif terhadap keberagaman budaya dan adat istiadat masyarakat lokal. Hal ini dapat memperburuk polarisasi dan meningkatkan risiko konflik horizontal.</p> <p>3. Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur juga mengangkat isu mengenai desentralisasi dan otonomi daerah. Ada kekhawatiran bahwa penempatan pusat pemerintahan di Kalimantan Timur dapat mengurangi otonomi daerah setempat, yang pada gilirannya bisa memicu gerakan separatis atau tuntutan untuk</p>	<p>1. Partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan IKN.</p> <p>2. Dialog budaya antar kelompok etnis.</p> <p>3. Memperkuat otonomi daerah dalam bingkai NKRI.</p>	<p>1. Pemerintah pusat dan pemda Kaltim harus melibatkan masyarakat lokal dalam pembangunan IKN.</p> <p>2. Badan OIKN, Pemda Kaltim, dan tokoh masyarakat adat rutin menggelar dialog budaya.</p> <p>3. Memperkuat hubungan kelembagaan antara pemerintah pusat dan pemda Kaltim dalam melaksanakan otonomi daerah.</p>

	lebih banyak otonomi bagi daerah setempat.		
Ekonomi	<p>1. Kesenjangan Ekonomi. Meskipun IKN diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur, tetapi ada risiko bahwa manfaat ekonomi hanya akan dirasakan oleh segelintir elit atau investor dari luar daerah, sementara masyarakat lokal tetap berada dalam jeratan kemiskinan. Kesenjangan ekonomi yang lebar ini menyulut ketidakpuasan sosial dan bisa memicu potensi disintegrasi sosial di wilayah IKN yang berdampak terhadap keutuhan NKRI.</p> <p>2. Migrasi dan Pengangguran. Pembangunan IKN akan menarik tenaga kerja dari berbagai daerah di Indonesia untuk bermigrasi ke IKN di Kalimantan Timur. Namun, tanpa perencanaan yang baik, migrasi massal ini bisa memicu persaingan di pasar kerja lokal, meningkatkan pengangguran, dan memicu terjadinya gesekan sosial antara pendatang dan masyarakat lokal.</p> <p>3. Distribusi Sumber Daya. Ada kekhawatiran bahwa pembangunan IKN akan memfokuskan alokasi sumber daya nasional di satu wilayah, sehingga mengurangi investasi di daerah lain. Ini bisa memperparah ketimpangan regional dan memicu kecemburuan antar daerah yang berpotensi mengganggu rasa persatuan dan kesatuan nasional dalam bingkai NKRI.</p>	<p>1. Pemerataan ekonomi dan pendapatan masyarakat.</p> <p>2. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat lokal.</p> <p>3. Pemerataan sumber daya antar daerah di Indonesia.</p>	<p>1. Badan OIKN dan Pemda Kaltim harus menggerakkan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada UMKM.</p> <p>2. Badan OIKN dan Pemda Kaltim menyelenggarakan pendidikan kewirausahaan bagi masyarakat lokal.</p> <p>3. Pemerintah pusat dan pemda Kaltim harus berkolaborasi dalam mengelola sumber daya pembangunan.</p>
Sosial	<p>1. Perubahan Demografis. Pembangunan IKN Nusantara akan mengubah komposisi demografis Kalimantan Timur dengan masuknya pendatang dari berbagai daerah. Hal ini bisa menimbulkan ketegangan sosial jika tidak ada upaya untuk melakukan optimalisasi integrasi sosial yang efektif antara</p>	<p>1. Menyeimbangkan komposisi demografi antara penduduk lokal dan pendatang.</p>	<p>1. Badan OIKN dan Pemda Kaltim membangun permukiman penduduk secara inklusif.</p>

	<p>masyarakat pendatang dan penduduk lokal.</p> <p>2. Budaya dan Identitas Lokal. Kalimantan Timur memiliki budaya dan adat istiadat yang kuat. Pembangunan IKN yang tidak menghormati atau tidak mengakomodasi budaya lokal dapat memicu resistensi dari masyarakat adat, yang merasa identitas mereka terancam oleh arus modernisasi dan migrasi sehingga berpotensi memicu disintegrasi sosial yang dapat mengancam keutuhan NKRI.</p> <p>3. Disparitas Sosial. Masuknya investor dan pendatang dengan status ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat lokal berpotensi meningkatkan disparitas sosial di wilayah IKN. Ketidakadilan sosial yang dirasakan oleh masyarakat lokal dapat memicu ketidakpuasan dan berpotensi memicu disintegrasi sosial yang dapat mengancam keutuhan NKRI.</p>	<p>2. Penghormatan terhadap budaya dan adat istiadat masyarakat lokal.</p> <p>3. Membangun inklusi sosial untuk mencegah disparitas sosial.</p>	<p>2. Badan OIKN dan Pemda Kaltim memberikan fasilitas bagi perkembangan budaya dan adat istiadat masyarakat lokal.</p> <p>3. Badan OIKN dan Pemda Kaltim harus memfasilitasi terwujudnya keadilan sosial, khususnya untuk masyarakat lokal.</p>
Teknologi	<p>1. Kesenjangan Digital. Pemanfaatan teknologi canggih dalam pembangunan IKN bisa menciptakan kesenjangan digital antara masyarakat lokal dan pendatang. Jika masyarakat lokal tidak dibekali dengan keterampilan yang memadai untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital, mereka bisa merasa terpinggirkan.</p> <p>2. Ketergantungan pada Teknologi. Ketergantungan yang tinggi pada teknologi dalam operasional pemerintahan dan infrastruktur kota di IKN dapat menimbulkan risiko jika masyarakat lokal belum siap atau tidak memiliki akses yang setara terhadap teknologi tersebut. Hal ini bisa memperburuk ketimpangan sosial dan berpotensi memicu disintegrasi sosial yang dapat mengancam keutuhan NKRI.</p>	<p>1. Meningkatkan literasi digital dan keterampilan bagi masyarakat lokal.</p> <p>2. Memperluas akses masyarakat terhadap teknologi.</p>	<p>1. Badan OIKN dan Pemda Kaltim harus meningkatkan program literasi digital dan ketrampilan masyarakat.</p> <p>2. Badan OIKN dan Pemda Kaltim harus mendorong masyarakat agar siap menggunakan teknologi.</p>
Lingkungan	<p>1. Kerusakan Lingkungan. Pembangunan IKN berpotensi menyebabkan kerusakan</p>	<p>1. Menjaga kelestarian lingkungan.</p>	<p>1. Badan OIKN, Pemda Kaltim dan para</p>

	<p>lingkungan seperti deforestasi, polusi, dan kerusakan ekosistem. Jika masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya alam untuk mata pencaharian mereka terdampak, hal ini bisa memicu ketegangan antara pemerintah dan masyarakat dan berpotensi memicu disintegrasi sosial yang dapat mengancam keutuhan NKRI.</p> <p>2. Pemindehan Komunitas. Pembangunan IKN bisa menyebabkan pemindahan komunitas lokal dari tanah adat mereka. Pemindehan paksa atau tanpa kompensasi yang adil dapat memicu resistensi sosial yang kuat dan menjadi sumber ketidakstabilan sehingga berpotensi memicu disintegrasi sosial yang dapat mengancam keutuhan NKRI.</p>	<p>2. Menjaga eksistensi komunitas masyarakat lokal.</p>	<p>pemangku kepentingan harus mengutamakan pembangunan IKN yang berwawasan lingkungan.</p> <p>2. Badan OIKN, Pemda Kaltim dan para pemangku kepentingan harus memelihara eksistensi komunitas masyarakat lokal.</p>
Hukum	<p>1. Kepastian Hukum. Ketiadaan kepastian hukum terkait hak atas tanah, izin pembangunan, dan kompensasi bagi masyarakat yang terdampak pembangunan IKN bisa menjadi potensi disintegrasi sosial yang dapat mengancam keutuhan NKRI. Masyarakat lokal yang merasa hak-hak mereka tidak dilindungi mungkin akan melakukan perlawanan, baik melalui jalur hukum maupun tindakan langsung.</p> <p>2. Penegakan Hukum. Penegakan hukum yang lemah atau tidak adil, terutama dalam menangani sengketa tanah dan pelanggaran hak asasi manusia, dapat memicu ketidakpuasan sosial yang berpotensi mengarah pada disintegrasi sosial. Masyarakat yang merasa diperlakukan tidak adil mungkin akan mencari jalan lain untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka, termasuk tindakan yang dapat mengancam stabilitas nasional.</p>	<p>1. Menjamin kepastian hukum.</p> <p>2. Penegakan hukum yang adil dan bermartabat.</p>	<p>1. Aparat penegak hukum harus mampu menjamin kepastian hukum.</p> <p>2. Aparat penegak hukum harus menegakkan hukum yang adil dan bermartabat.</p>

14. Hambatan/Tantangan Pelaksanaan Integrasi Sosial di Wilayah IKN

Kehidupan sosial di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) yang baru di Kalimantan Timur masih dalam tahap perkembangan awal, dengan sejumlah dinamika yang mencerminkan perubahan besar yang sedang berlangsung. Wilayah IKN dihuni oleh berbagai kelompok etnis, termasuk penduduk asli Dayak dan suku-suku lain dari Kalimantan, serta pendatang dari berbagai daerah di Indonesia. Keragaman ini menciptakan lingkungan sosial yang kaya namun juga kompleks, khususnya terkait dengan integrasi sosial. Penduduk asli Kalimantan, terutama suku Dayak, sedang menyesuaikan diri dengan perubahan besar yang dibawa oleh proyek pembangunan IKN. Mereka menghadapi tantangan dalam mempertahankan budaya dan cara hidup tradisional mereka di tengah arus modernisasi dan urbanisasi. Proyek IKN telah menarik banyak pekerja dari luar daerah, yang datang untuk bekerja di sektor konstruksi dan layanan pendukung. Ini menciptakan dinamika sosial baru, di mana penduduk lokal dan pendatang harus belajar hidup berdampingan secara harmonis.

Kondisi infrastruktur sosial di IKN seperti sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya masih dalam tahap pengembangan. Pemerintah berupaya membangun fasilitas yang memadai untuk mendukung pertumbuhan populasi dan memastikan kualitas hidup yang baik bagi semua warga. Ekonomi lokal juga sedang mengalami transformasi, dengan banyaknya proyek pembangunan yang membuka peluang kerja baru. Namun, terbuka kemungkinan adanya kesenjangan ekonomi antara penduduk lokal dan pendatang, di mana pendatang seringkali memiliki akses yang lebih baik ke pekerjaan bergaji tinggi dibandingkan dengan penduduk lokal. Di satu sisi, interaksi antara penduduk lokal dan pendatang sebenarnya dapat menciptakan peluang untuk pertukaran budaya, namun di sisi lain juga dapat memicu gesekan jika perbedaan tidak dikelola dengan baik. Upaya untuk mempromosikan dialog antarbudaya dan menghargai keragaman menjadi sangat penting.

Sejak ditetapkannya UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN yang kemudian diikuti dengan kegiatan pembangunan infrastruktur di wilayah IKN secara bertahap di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, nampaknya mulai terlihat dinamika sosial yang membawa eksese negatif dan menjadi hambatan/tantangan integrasi sosial di wilayah IKN, baik di wilayah

Kabupaten Penajam Paser Utara maupun wilayah-wilayah sekitarnya yang ada di Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam pembahasan berikut ini akan diuraikan beberapa hambatan/tantangan integrasi sosial di wilayah IKN sebagai jawaban atas pertanyaan kajian kedua dalam Taskap ini. Secara garis besar, hambatan/tantangan pelaksanaan integrasi sosial di wilayah IKN adalah kesenjangan ekonomi, ketimpangan sosial, migrasi penduduk, dan persaingan dalam penguasaan sumberdaya.

a. Kesenjangan Ekonomi

Dalam proses pembangunan di suatu wilayah seharusnya pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi merupakan dua tujuan yang harus dapat dicapai secara bersamaan. Pembangunan ekonomi dapat dikatakan berhasil apabila suatu wilayah/daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat secara merata. Pertumbuhan ekonomi tanpa adanya pemerataan ekonomi akan memperlebar jurang pemisah antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya (kaya dan miskin) atau antara wilayah yang satu dengan yang lain (maju dan tertinggal). Ketimpangan yang tinggi dapat memunculkan berbagai permasalahan antara lain kecemburuan sosial, kerawanan disintegrasi wilayah dan disparitas ekonomi yang makin lebar dan tajam.²⁹

Kalimantan Timur merupakan penyumbang hampir 50 persen perekonomian di Pulau Kalimantan. Meskipun demikian pertumbuhan ekonomi tidak sejalan dengan pemerataan pembangunan yang ada di kabupaten/kota. Terlihat dari masih banyak daerah tertinggal di Provinsi Kalimantan Timur yang sulit untuk akses masuk ke daerah tersebut. Sulitnya akses masuk ke daerah ini dapat menyebabkan mobilitas barang dan jasa di daerah tersebut terhambat, sehingga akan membuat daerah tersebut semakin tertinggal. Salah satu fenomena tersebut merupakan

²⁹ chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://bappeda.kaltimprov.go.id/storage/file/5eMkdEYQAiaonNP6.pdf. Diakses pada Sabtu, 17 Agustus 2024 jam 8.10 WIB.

ketimpangan wilayah antar daerah yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur.

Provinsi Kalimantan Timur memiliki 10 kabupaten/kota dengan karakteristik sumber daya alam yang hampir sama yaitu pada sektor pertanian serta sektor pertambangan dan penggalian. Meskipun memiliki sumber daya alam yang hampir sama tetapi tidak memberikan pendapatan ekonomi yang berbeda. Angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 yang tinggi di dominasi oleh beberapa kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara PDRB-nya sebesar 135.406.045,93 (dalam juta rupiah), Kabupaten Kutai Timur PDRB-nya sebesar 104.663.188,97 (dalam juta rupiah), dan Kota Balikpapan PDRB-nya sebesar 97.060.152,81 (dalam juta rupiah). Sedangkan di Kabupaten Mahakam Ulu angka PDRB tahun 2023 hanya sebesar 1.852.956,21 (dalam juta rupiah).³⁰ PDRB merupakan salah satu indikator untuk melihat kinerja pembangunan perekonomian yang mencerminkan seluruh nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam periode tertentu. PDRB juga merupakan salah satu indikator untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goal*). Selain itu, persebaran jumlah penduduk juga belum merata di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Perbedaan ini membuat tingkat pertumbuhan pembangunan di masing-masing daerah di Kalimantan Timur tidak merata sehingga menyebabkan terjadinya kesenjangan ekonomi.

Kesenjangan ekonomi di Kalimantan Timur adalah hasil dari kombinasi berbagai faktor, termasuk ketergantungan pada sektor pertambangan, kurangnya diversifikasi ekonomi, infrastruktur yang tidak merata, pendidikan yang terbatas, kebijakan pemerintah yang kurang efektif, dampak lingkungan dan sosial, serta migrasi dan urbanisasi yang tidak terkendali. Mengatasi kesenjangan ini membutuhkan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, dengan fokus pada diversifikasi ekonomi, peningkatan pendidikan dan keterampilan, pembangunan infrastruktur yang merata, serta kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak pada

³⁰ Data bersumber dari BPS Kalimantan Timur Tahun 2023.

masyarakat lokal. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kesenjangan ekonomi di Kalimantan Timur dapat dikurangi, sehingga seluruh masyarakat dapat menikmati manfaat dari kekayaan alam dan pembangunan di daerah ini.

Kesenjangan ekonomi di Kalimantan Timur memiliki dampak yang signifikan terhadap proses optimalisasi integrasi sosial di wilayah IKN guna menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kesenjangan ekonomi di Kalimantan Timur terutama terjadi antara masyarakat lokal yang kurang terlibat dalam industri besar dan pekerja pendatang yang bekerja di sektor pertambangan, energi, dan konstruksi. Ketika pembangunan IKN menarik lebih banyak pendatang dari berbagai daerah di Indonesia, potensi pergesekan sosial meningkat, terutama jika penduduk lokal merasa terpinggirkan atau tidak mendapatkan manfaat yang sebanding dengan kehadiran IKN. Apabila kesenjangan ekonomi ini tidak ditangani dengan efektif tentu dapat menghambat proses integrasi sosial di wilayah IKN. Ketidakpuasan ini bisa memicu resistensi terhadap proyek IKN dan kebijakan pemerintah, serta memperburuk ketegangan sosial antara pendatang dan penduduk asli. Integrasi sosial yang gagal di wilayah IKN berpotensi mengancam keutuhan NKRI.

Bertitik tolak dari uraian di atas, menarik untuk membahas dan menganalisis keterkaitan antara kesenjangan ekonomi di Kalimantan Timur sebagai hambatan/tantangan pelaksanaan integrasi dengan optimalisasi integrasi sosial di wilayah IKN guna menjaga keutuhan NKRI menggunakan perspektif Teori Manajemen Risiko. Pembahasan dan analisis ini juga menegaskan adanya korelasi positif antara kerangka teoritis dengan data penelitian.

Sebagaimana telah disebutkan dalam Bab II Pasal 10 tentang Kerangka Teoritis, menurut Herman Darmawi manajemen risiko adalah suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi.³¹ Dalam konteks ini, perlu

³¹ Darmawi, Herman. (2006). *Op.Cit.* h. 17

dipahami bahwa kesenjangan ekonomi di Kalimantan Timur merupakan risiko sosial yang dapat menghambat optimalisasi integrasi sosial di wilayah IKN. Ketimpangan pendapatan dan akses terhadap sumber daya ekonomi antara masyarakat lokal dan pendatang berpotensi menimbulkan disintegrasi sosial, ketidakpuasan, dan resistensi terhadap pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Hal ini tentu dapat menjadi ancaman bagi stabilitas sosial dan politik yang pada akhirnya juga dapat mengancam keutuhan NKRI.

Selanjutnya dalam Teori Manajemen Risiko disebutkan bahwa tujuan utama manajemen risiko adalah untuk meminimalkan dampak negatif dari risiko yang terjadi dan memaksimalkan peluang yang bisa timbul dari situasi yang tidak pasti. Proses ini biasanya melibatkan beberapa langkah utama, yaitu identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi atau penilaian risiko, penanganan risiko, dan pemantauan serta review risiko secara berkala. Dalam konteks ini, dampak kesenjangan ekonomi terhadap pelaksanaan integrasi sosial di IKN cukup signifikan. Jika masyarakat lokal merasa terpinggirkan, mereka mungkin tidak mendukung proses integrasi sosial yang diperlukan untuk keberhasilan pembangunan IKN sebagai simbol persatuan nasional. Penilaian risiko ini menunjukkan bahwa ketidakmerataan ekonomi bisa menjadi pemicu disintegrasi sosial jika tidak dikelola dengan baik. Selain itu, untuk mengurangi risiko ini, diperlukan strategi mitigasi agar upaya optimalisasi integrasi sosial di wilayah IKN guna menjaga keutuhan NKRI dapat berjalan dengan baik. Pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, pelibatan mereka dalam proyek pembangunan IKN, dan peningkatan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan adalah langkah-langkah penting. Dengan demikian, kesenjangan ekonomi dapat diminimalkan sehingga mendukung tercapainya pelaksanaan integrasi sosial yang kuat di IKN guna menjaga keutuhan NKRI.

b. Ketimpangan Sosial

Hambatan/tantangan pelaksanaan integrasi sosial di wilayah IKN berikutnya adalah ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial ini merujuk

pada perbedaan yang mencolok dalam akses terhadap sumber daya dan kesempatan antara kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain. Untuk mengidentifikasi ketimpangan sosial di suatu wilayah, salah satu indikator yang umum digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM, sebagaimana dijelaskan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP), merupakan alat yang digunakan untuk mengukur “sejauh mana penduduk suatu daerah dapat mengakses hasil-hasil pembangunan. Khususnya, IPM memberikan gambaran mengenai kemampuan penduduk dalam memperoleh pendapatan, akses terhadap layanan kesehatan, serta kesempatan dalam bidang pendidikan. Pengukuran IPM ini didasarkan pada tiga dimensi utama, yaitu: umur panjang dan hidup sehat, tingkat pengetahuan yang dicerminkan melalui tingkat pendidikan, serta standar hidup yang layak”³² yang mencakup aspek pendapatan dan kesejahteraan ekonomi. Dengan demikian, IPM menjadi salah satu ukuran yang penting dalam menilai tingkat ketimpangan sosial di suatu daerah dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi proses integrasi sosial di wilayah IKN.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Timur tahun 2023 mencapai 78.20, meningkat 0.84 poin (1.09 persen) dibandingkan tahun sebelumnya (77.36). Selama tahun 2020–2023, IPM Kalimantan Timur rata-rata meningkat sebesar 0.98 persen per tahun. Peningkatan IPM Kalimantan Timur 2023 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, maupun standar hidup layak. Pertumbuhan IPM Kalimantan Timur 2023 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74.72 tahun, meningkat 0.27 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Sumber data umur harapan hidup saat lahir menggunakan hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF). Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0.18 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13.84 menjadi 14.02 tahun, sedangkan rata-rata lama

³² BPS. (2020). *Indeks Pembangunan Manusia 2020*. Publikasi BPS

sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0.07 tahun, dari 9.92 tahun menjadi 9.99 tahun pada 2023. Sumber data HLS dan RLS menggunakan hasil Susenas Maret. Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) meningkat 561 ribu rupiah (4.44 persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Sumber data pengeluaran riil per kapita per tahun menggunakan hasil Susenas Maret.³³

Ketimpangan sosial di Kalimantan Timur merupakan salah satu hambatan/tantangan pelaksanaan integrasi sosial di wilayah IKN guna menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ketimpangan sosial merujuk pada ketidakseimbangan dalam distribusi sumber daya, akses terhadap layanan dasar, serta peluang ekonomi di antara kelompok-kelompok masyarakat. Di Kalimantan Timur, ketimpangan ini dapat diamati dari berbagai aspek, seperti perbedaan pendapatan, akses pendidikan, dan layanan kesehatan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan, serta antara penduduk asli dan pendatang.

Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa ketimpangan sosial yang terjadi di Kalimantan Timur dapat menjadi hambatan/tantangan proses integrasi sosial di IKN. Selaras dengan Teori Integrasi Sosial sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II, integrasi sosial adalah proses di mana individu dan kelompok dalam masyarakat dapat hidup bersama secara harmonis, berbagi nilai-nilai, norma, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dengan adil. Ketika ketimpangan sosial tinggi, terjadi ketidakadilan yang menyebabkan munculnya perasaan terpinggirkan di kalangan kelompok masyarakat tertentu. Hal ini dapat memicu ketegangan sosial, prasangka, dan bahkan disintegrasi sosial dalam skala yang luas dan dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Di Kalimantan Timur, ketimpangan antara penduduk asli dan pendatang, misalnya, dapat menyebabkan munculnya rasa tidak puas di kalangan penduduk asli yang merasa bahwa mereka tidak mendapatkan

³³ <https://kaltim.bps.go.id/pressrelease/2023/12/01/1018/indeks-pembangunan-manusia--ipm--kalimantan-timur-tahun-2023-berstatus-tinggi-yakni-sebesar-78-20.html>. Diakses pada Sabtu, 17 Agustus 2024 jam 9.35 WIB.

manfaat yang sebanding dari pembangunan IKN yang terjadi di wilayah mereka. Pendatang, yang umumnya datang untuk bekerja di sektor-sektor industri seperti pertambangan dan perkebunan, seringkali memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Ketimpangan sosial ini dapat menimbulkan perasaan ketidakadilan dan eksklusi sosial, yang pada gilirannya selanjutnya dapat memperburuk proses integrasi sosial.

Keutuhan NKRI sangat bergantung pada kemampuan negara untuk memastikan bahwa setiap warganya merasa dilibatkan dan diperlakukan secara adil dalam pembangunan IKN. Ketimpangan sosial yang berlarut-larut di Kalimantan Timur dapat menjadi ancaman serius bagi keutuhan NKRI jika tidak segera diatasi. Ketimpangan yang dibiarkan tumbuh dapat memicu sentimen kedaerahan, di mana kelompok masyarakat tertentu merasa lebih memiliki wilayah tersebut dibandingkan dengan kelompok lain. Jika ini terjadi, maka munculnya gerakan-gerakan separatis atau tuntutan otonomi yang lebih besar bukanlah hal yang mustahil.

Selain itu, ketimpangan sosial juga berdampak pada partisipasi politik dan rasa kebangsaan. Masyarakat yang merasa terpinggirkan cenderung kurang berpartisipasi dalam proses politik, seperti pemilihan umum, dan cenderung lebih apatis terhadap kebijakan pemerintah. Hal ini dapat menciptakan jurang antara pemerintah dan masyarakat, yang pada akhirnya melemahkan ikatan sosial dan rasa persatuan di antara warga negara.

Untuk menjaga keutuhan NKRI, penting bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam mengatasi ketimpangan sosial di Kalimantan Timur. Peningkatan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi bagi masyarakat yang terpinggirkan merupakan langkah awal yang krusial. Program-program pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan harus dirancang untuk memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, termasuk penduduk asli, mendapatkan manfaat yang seimbang dari pembangunan IKN.

Selain itu, dialog dan komunikasi yang terbuka antara berbagai kelompok masyarakat juga penting untuk memfasilitasi pelaksanaan integrasi sosial di wilayah IKN. Pemerintah, bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat dan organisasi non-pemerintah, harus bekerja sama dalam membangun kepercayaan dan pengertian di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Dengan demikian, ketimpangan sosial dapat diminimalkan, dan integrasi sosial di wilayah IKN yang kuat dapat terwujud, sehingga pada akhirnya dapat menjaga keutuhan NKRI.

c. Migrasi Penduduk

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020) menunjukkan angka migrasi seumur hidup ke Kalimantan meningkat tiga kali lipat dalam lima dekade terakhir atau sejak 1971. Deputi bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono menyampaikan, terjadi pergeseran pola migrasi yang tidak lagi berpusat di Jawa dan Sumatra, kini Kalimantan menjadi pilihan. Kehadiran Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara turut mendorong migrasi ke Kalimantan semakin tinggi. Berdasarkan laporan tersebut, angka migrasi seumur hidup antarprovinsi hasil Long Form SP2020 sebesar 9,83 persen atau sekitar 1 dari 10 penduduk Indonesia bertempat tinggal di provinsi yang berbeda dengan provinsi tempat lahirnya. Tiga provinsi dengan angka migrasi seumur hidup tertinggi adalah Kepulauan Riau (40,55), Kalimantan Timur (29,52), dan Kalimantan Utara (28,60).³⁴

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) telah mengungkapkan dalam laporannya bahwa jumlah penduduk di Ibu Kota Negara (IKN) diperkirakan akan mengalami peningkatan signifikan dari sekitar 100 ribu orang pada tahun 2020 menjadi 700 ribu orang pada tahun 2025. Seiring dengan perkembangan dan pembangunan di IKN, jumlah penduduk diproyeksikan

³⁴ <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230130/9/1622913/migrasi-penduduk-ke-kalimantan-naik-3-kali-lipat-gara-gara-ikn>. Diakses pada Sabtu 17 Agustus 2024 jam 13.35 WIB.

akan terus bertambah hingga mencapai 1,5 hingga 1,6 juta orang pada tahun 2035.³⁵

Migrasi penduduk ke IKN merupakan salah satu tantangan dalam pelaksanaan integrasi sosial. Perpindahan penduduk yang masif ke IKN akan mengakibatkan bertemunya berbagai kelompok masyarakat dengan latar belakang etnis, budaya, agama, dan bahasa yang beragam. Hal ini jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan potensi gesekan di tengah masyarakat dan mengganggu integrasi sosial.

Salah satu hambatan utama adalah perbedaan identitas budaya dan etnis yang bisa memicu ketegangan sosial. Penduduk asli di daerah sekitar IKN mungkin merasa terancam dengan kehadiran pendatang yang memiliki kebiasaan, adat istiadat, dan pola hidup berbeda. Ini bisa menimbulkan perasaan eksklusivitas atau marginalisasi di antara kelompok-kelompok masyarakat, yang pada gilirannya dapat menghambat proses integrasi sosial.

Selain itu, perbedaan tingkat pendidikan, keterampilan, dan akses terhadap sumber daya ekonomi juga dapat menciptakan kesenjangan sosial yang signifikan. Pendatang yang lebih terampil atau memiliki modal lebih besar mungkin lebih cepat beradaptasi dan mengambil alih peluang ekonomi, sementara penduduk lokal bisa tertinggal. Kesenjangan ini dapat memperburuk ketidakadilan sosial dan memicu pertentangan antar kelompok.

Hambatan lainnya adalah kurangnya infrastruktur dan layanan sosial yang memadai di IKN pada tahap awal pengembangan. Fasilitas seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang belum optimal dapat menyulitkan proses adaptasi pendatang baru dan menciptakan tekanan sosial yang tinggi. Tanpa adanya intervensi pemerintah untuk memperkuat kohesi sosial, ketegangan antara pendatang dan penduduk lokal dapat meningkat. Oleh karena itu, integrasi sosial di IKN memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk program pendidikan multikultural,

³⁵ Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2022). *Menyambut Nusantara*. Internet. Diakses pada 19 Mei 2024 dari link <https://www.kemenkopmk.go.id/menyambut-nusantara>

pengembangan ekonomi yang inklusif, serta penguatan dialog antar komunitas untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan kohesif.

d. Persaingan dalam Penguasaan Sumberdaya

Kalimantan Timur dikenal memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, baik yang berasal dari sektor pertambangan, energi, perkebunan, dan kehutanan. Meskipun demikian, seiring dengan dinamika pembangunan IKN yang diikuti oleh pertumbuhan penduduk di wilayah IKN dan sekitarnya, tentu lambat laun akan memunculkan persaingan antara penduduk lokal dengan pendatang dalam penguasaan sumber daya yang ada.

Persaingan dalam penguasaan sumber daya di IKN merupakan tantangan signifikan bagi pelaksanaan integrasi sosial. Dengan perpindahan penduduk yang besar-besaran ke IKN, terjadi peningkatan permintaan terhadap berbagai sumber daya, seperti lahan, air, energi, dan peluang ekonomi. Ketika kelompok-kelompok pendatang dan penduduk lokal berlomba-lomba menguasai sumber daya ini, potensi disintegrasi sosial menjadi lebih besar.

Salah satu bentuk persaingan yang menonjol adalah dalam hal kepemilikan lahan. Lahan di IKN akan menjadi sangat berharga, dan persaingan untuk menguasainya bisa menimbulkan pertentangan antara penduduk lokal dan pendatang. Penduduk lokal mungkin merasa terancam dengan perubahan cepat yang terjadi di lingkungan mereka, terutama jika lahan yang mereka miliki atau gunakan sejak lama diambil alih oleh pihak-pihak yang lebih kuat secara ekonomi. Ketegangan ini dapat menghambat proses integrasi sosial karena menciptakan rasa ketidakadilan dan marginalisasi.

Selain itu, persaingan untuk mendapatkan akses terhadap pekerjaan dan peluang ekonomi juga dapat menimbulkan masalah. Pendatang dengan keterampilan atau modal yang lebih besar mungkin lebih mudah mendapatkan pekerjaan atau memulai usaha, sementara penduduk lokal bisa tertinggal dan merasa terpinggirkan. Ketimpangan ini dapat

memperburuk ketegangan sosial dan memperlambat upaya integrasi antara pendatang dan komunitas lokal.

Ketidakmerataan dalam akses terhadap infrastruktur dan layanan publik juga dapat memicu persaingan. Jika tidak ada distribusi yang adil dalam hal akses terhadap air bersih, energi, pendidikan, dan layanan kesehatan, kelompok-kelompok masyarakat tertentu bisa merasa dirugikan, sehingga memicu konflik dan menghambat integrasi sosial. Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan kebijakan yang memastikan distribusi sumber daya yang adil dan inklusif di IKN. Pemerintah perlu berperan aktif dalam mengelola sumber daya secara transparan dan adil, serta mendorong dialog antar komunitas untuk mencegah konflik dan memperkuat pelaksanaan integrasi sosial di wilayah IKN.

Bertitik tolak dari uraian di atas, menarik untuk menganalisis keterkaitan antara persaingan dalam penguasaan sumber daya sebagai hambatan/tantangan pelaksanaan integrasi dengan optimalisasi integrasi sosial di wilayah IKN guna menjaga keutuhan NKRI menggunakan perspektif Teori Kontingensi. Analisis ini menunjukkan adanya korelasi positif antara kerangka teoritis dengan data penelitian.

Teori kontingensi adalah teori tentang kecocokan kepemimpinan, yang menekankan pentingnya menyesuaikan pemimpin dengan situasi yang tepat. Dikemukakan oleh Fiedler, teori ini menyatakan bahwa kinerja seorang pemimpin dipengaruhi oleh pemahamannya terhadap situasi yang ia pimpin. Teori ini berangkat dari filosofi bahwa setiap organisasi memiliki karakteristik unik dan menghadapi tantangan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, teori kontingensi berpendapat bahwa setiap situasi membutuhkan pendekatan kepemimpinan yang berbeda, dan setiap organisasi memerlukan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan karakteristiknya.³⁶ Berdasarkan Teori Kontingensi ini, dalam konteks untuk mencegah dampak negatif persaingan dalam penguasaan sumber daya di IKN antara penduduk lokal dengan pendatang yang dapat menghambat

³⁶ chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://repo.darmajaya.ac.id/2490/6/BAB%20II.pdf. Diakses pada Rabu, 15 Agustus 2024 jam 15.40 WIB.

pelaksanaan integrasi sosial di wilayah IKN, maka pemerintah pusat melalui OIKN dan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur beserta para pemangku kepentingan lainnya harus melakukan pendekatan kepemimpinan yang sesuai dengan karakter sosial, budaya dan adat istiadat masyarakat setempat di wilayah IKN.

15. Upaya Optimalisasi Integrasi Sosial di Wilayah IKN Guna Menjaga Keutuhan NKRI

Mengacu kepada Teori Integrasi Sosial sebagaimana telah diuraikan pada Bab II, integrasi merupakan sebuah proses penyatuan yang didasarkan pada aturan-aturan kelompok, di mana norma-norma tersebut berperan sebagai elemen pengendali perilaku individu. Integrasi dianggap sukses ketika anggota masyarakat merasa dapat saling membantu dan melengkapi dalam memenuhi kebutuhan. Ketercapaian integrasi sosial ditandai dengan adanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma sosial yang bertahan lama dan stabil.³⁷ Konsep teori integrasi sosial juga mengasumsikan bahwa masyarakat hidup dan berkembang dalam sistem sosial yang mengutamakan keseimbangan (ekuilibrium). Menurut Emile Durkheim, integrasi sosial dapat terjadi jika terbangun rasa saling ketergantungan di antara kelompok masyarakat yang terspesialisasikan berdasarkan pada adanya rasa saling percaya, serta nilai yang secara fungsional saling bergantung dalam masyarakat yang beragam.³⁸ Lebih jauh dalam perspektif fungsionalisme, Durkheim melihat masyarakat sebagai sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan berfungsi bersama untuk menjaga kestabilan dan keseimbangan sosial. Dalam konteks IKN, teori ini akan melihat bagaimana berbagai institusi seperti pemerintahan, pendidikan, dan ekonomi berfungsi untuk mendukung integrasi sosial. Dalam konteks ini, pemerintah memainkan peran penting dalam menciptakan kebijakan yang memfasilitasi integrasi sosial, misalnya melalui pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik yang inklusif, dan program-program sosial yang mendukung keragaman. Sistem pendidikan yang baik juga dapat menjadi alat penting untuk menyatukan berbagai kelompok etnis

³⁷ Susanto, Astrid S. *Loc.Cit.*

³⁸ Retnowati. *Loc.Cit.*

dan budaya di wilayah IKN, mengajarkan nilai-nilai bersama, dan mempromosikan toleransi. Sedangkan pembangunan ekonomi yang inklusif akan memastikan bahwa semua kelompok memiliki akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi, yang dapat mengurangi ketegangan sosial.

Sesuai dengan Teori Integrasi Sosial di atas, maka untuk mengoptimalkan integrasi sosial di wilayah IKN guna menjaga keutuhan NKRI di tengah kondisi keberagaman masyarakat dan dinamika perubahan sosial yang melingkupinya, tentu dibutuhkan prasyarat yang memungkinkan proses integrasi sosial tersebut dapat diwujudkan dalam realitas kehidupan masyarakat sehingga proses penyatuan antar anggota masyarakat bukanlah sesuatu yang dipaksakan, melainkan muncul sebagai buah kesadaran dan kebutuhan bersama. Prasyarat tersebut diantaranya adalah: Pertama, anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan antara satu dengan yang lain sesuai dengan asas manfaat. Kedua, terciptanya kesepakatan (konsensus) bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman bersama. Ketiga, norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial.

Integrasi sosial di wilayah IKN melibatkan berbagai langkah dan upaya untuk menciptakan keharmonisan di antara beragam kelompok masyarakat yang tinggal di sana, baik masyarakat lokal maupun pendatang. Secara keseluruhan, kondisi integrasi sosial di wilayah IKN saat ini berada dalam tahap perkembangan dengan berbagai inisiatif yang dilakukan untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan harmonis.

Upaya optimalisasi integrasi sosial di wilayah IKN guna menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dilakukan untuk mengatasi tantangan/hambatan yang berupa kesenjangan ekonomi, ketimpangan sosial, migrasi penduduk, dan persaingan dalam penguasaan sumber daya. Karena itu, perlu dipahami terlebih dahulu kompleksitas dari masing-masing tantangan/hambatan tersebut. Selanjutnya, strategi yang tepat harus dirancang untuk mengatasi tantangan/hambatan tersebut sebagai upaya optimalisasi integrasi sosial di wilayah IKN guna menjaga keutuhan NKRI.

Sebagai jawaban atas pertanyaan kajian ketiga dalam Taskap ini, maka upaya optimalisasi integrasi sosial di wilayah IKN guna menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Mengatasi kesenjangan ekonomi

1) Identifikasi masalah:

Kesenjangan ekonomi antara penduduk asli di sekitar wilayah IKN dan pendatang dari daerah lain merupakan salah satu tantangan utama. Ketimpangan dalam distribusi sumber daya, akses terhadap pekerjaan yang layak, dan disparitas dalam pendapatan dapat memicu ketidakpuasan sosial dan berpotensi menyebabkan disintegrasi sosial.

2) Solusi:

a) Pembangunan infrastruktur ekonomi yang inklusif: Pemerintah perlu membangun infrastruktur yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, baik penduduk asli maupun pendatang. Investasi dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan transportasi harus difokuskan untuk menciptakan kesetaraan kesempatan ekonomi.

b) Program ekonomi berbasis komunitas: Mengembangkan program ekonomi yang melibatkan masyarakat setempat secara langsung, seperti pelatihan keterampilan dan kewirausahaan berbasis potensi lokal. Dengan demikian, penduduk asli dapat ikut serta dalam pembangunan ekonomi IKN dan tidak merasa terpinggirkan.

c) Perlindungan terhadap sektor informal: Banyak penduduk asli yang terlibat dalam sektor ekonomi informal. Upaya formalisasi sektor ini melalui regulasi yang mendukung dan akses permodalan yang memadai akan membantu mengurangi kesenjangan ekonomi.

d) Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM): Penguatan UMKM lokal dengan akses ke pasar, pelatihan, dan teknologi akan memperkecil kesenjangan ekonomi dengan

memberikan kesempatan kepada penduduk setempat untuk bersaing dalam ekonomi baru yang muncul di IKN.

b. Mengatasi ketimpangan sosial

1) Identifikasi masalah:

Ketimpangan sosial di wilayah IKN dapat muncul dari perbedaan latar belakang budaya, agama, dan status sosial antara pendatang dan penduduk asli. Hal ini bisa memicu prasangka, stereotip, dan diskriminasi yang berdampak pada disintegrasi sosial.

2) Solusi:

- a) **Dialog antarbudaya dan agama:** Mengadakan forum-forum dialog antarbudaya dan agama yang melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan organisasi sosial. Tujuannya untuk membangun pemahaman, toleransi, dan kerja sama antara berbagai kelompok.
- b) **Pendidikan multikultural:** Kurikulum pendidikan di wilayah IKN harus mengintegrasikan nilai-nilai multikulturalisme yang menghargai keberagaman etnis, budaya, dan agama. Pendidikan ini penting untuk menciptakan generasi yang lebih inklusif dan toleran.
- c) **Kebijakan afirmatif:** Penerapan kebijakan afirmatif untuk kelompok-kelompok yang terpinggirkan dapat membantu mengurangi ketimpangan sosial. Misalnya, memberikan beasiswa pendidikan atau program pelatihan khusus bagi masyarakat asli yang kurang beruntung.
- d) **Penguatan komunitas lokal:** Membangun pusat-pusat komunitas yang bisa menjadi tempat berkumpulnya warga dari berbagai latar belakang untuk berinteraksi secara positif. Pusat-pusat ini bisa berfungsi sebagai sarana untuk kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi bersama.

c. Mengatasi migrasi penduduk

1) Identifikasi masalah:

IKN yang baru dibangun akan menarik migrasi penduduk besar-besaran dari berbagai daerah di Indonesia. Jika tidak dikelola dengan baik, migrasi ini bisa menimbulkan gesekan sosial, ketegangan, dan tekanan terhadap sumber daya lokal sehingga mengganggu integrasi sosial.

2) Solusi:

- a) **Perencanaan urban yang inklusif:** Pemerintah harus menerapkan perencanaan urban yang mempertimbangkan kebutuhan penduduk asli dan pendatang. Penyediaan hunian yang layak, fasilitas publik, dan ruang-ruang sosial harus diatur sedemikian rupa agar bisa mengakomodasi keberagaman.
- b) **Regulasi migrasi:** Pembuatan regulasi yang mengatur arus migrasi penduduk, termasuk penyaringan dan penempatan pendatang di wilayah yang sesuai dengan keterampilan dan kebutuhan pasar kerja lokal. Hal ini akan mencegah terjadinya kepadatan penduduk dan mencegah disintegrasi sosial.
- c) **Kebijakan integrasi pendatang:** Mengembangkan program-program integrasi bagi pendatang, seperti kursus bahasa lokal, sosialisasi budaya setempat, dan kegiatan-kegiatan sosial yang melibatkan pendatang dan penduduk asli secara bersama-sama.
- d) **Penyediaan layanan publik yang merata:** Layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi harus disediakan secara merata bagi seluruh penduduk, baik asli maupun pendatang. Dengan demikian, tidak ada kelompok yang merasa diabaikan atau terpinggirkan.

d. Mengatasi persaingan dalam penguasaan sumber daya

1) Identifikasi masalah:

Wilayah IKN yang kaya akan sumber daya alam bisa menjadi lahan perebutan antara berbagai pihak, baik penduduk asli maupun pendatang. Persaingan ini dapat memicu gesekan sosial yang mengganggu proses integrasi sosial di wilayah IKN.

2) Solusi:

- a) **Pengaturan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan:** Pemerintah harus memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam di wilayah IKN dilakukan secara adil dan berkelanjutan. Ada baiknya jika pemerintah menerapkan regulasi yang mengatur pembagian manfaat dari sumber daya alam secara merata kepada seluruh penduduk.
- b) **Kolaborasi pemerintah dengan masyarakat lokal:** Pemerintah harus melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam. Ini bisa dilakukan melalui mekanisme partisipasi yang transparan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan IKN yang berkaitan dengan sumber daya alam.
- c) **Perlindungan hak-hak adat:** Pemerintah harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak adat masyarakat setempat. Ini mencakup hak atas tanah, sumber daya alam, dan budaya yang ada di wilayah IKN. Dengan menghormati hak-hak adat, potensi disintegrasi sosial bisa diminimalkan.
- d) **Pemberdayaan ekonomi berbasis sumber daya lokal:** Mengembangkan program pemberdayaan ekonomi yang berbasis pada sumber daya lokal akan membantu memastikan bahwa penduduk asli mendapatkan manfaat yang adil dari pengelolaan sumber daya alam. Program ini bisa mencakup pelatihan keterampilan, akses ke pasar, dan dukungan permodalan.

Upaya optimalisasi integrasi sosial di wilayah IKN guna menjaga keutuhan NKRI tersebut memerlukan ikhtiar dan langkah-langkah yang komprehensif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang terkait, terutama: Badan Otorita IKN selaku kepanjangan tangan pemerintah pusat di IKN, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di sekitar IKN, aparat keamanan, ormas keagamaan maupun ormas kesukuan, serta tokoh masyarakat dan adat. Hal ini sejalan dengan Teori Optimalisasi, yaitu suatu ikhtiar yang dilakukan secara sungguh-sungguh untuk menemukan alternatif terbaik dari beberapa pilihan yang ada, sehingga efektifitas dan efisiensi dapat tercapai dalam penggunaan sumber daya yang tersedia. Sehingga dilihat dari perspektif usaha, optimalisasi dapat dimaknai sebagai ukuran yang

menyebabkan tercapainya tujuan yang diharapkan. Dengan demikian, optimalisasi merupakan usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan tujuan yang diharapkan atau dikehendaki.³⁹ Dengan demikian, perwujudan ikhtiar yang berupa upaya optimalisasi integrasi sosial di wilayah IKN secara efektif dan efisien ditujukan guna menjaga keutuhan NKRI sesuai dengan Teori Optimalisasi.

Pemindahan IKN dari Jakarta ke Nusantara merupakan agenda strategis nasional yang sangat kompleks dan berpotensi menjadi hambatan/tantangan bagi pelaksanaan integrasi sosial di wilayah IKN guna menjaga keutuhan NKRI. Dengan perencanaan yang matang, dialog yang baik, dan kebijakan yang partisipatif dan inklusif, harapannya adalah potensi hambatan/tantangan integrasi sosial tersebut dapat dikelola dan diatasi dengan baik sehingga pemindahan IKN dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan integrasi sosial di wilayah IKN guna menjaga keutuhan NKRI, pemerintah harus memastikan adanya partisipasi publik yang luas dalam pengambilan keputusan, termasuk dialog dan konsultasi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat di wilayah IKN, khususnya warga masyarakat yang terkena dampak negatif pembangunan IKN. Pemerintah juga harus memperhatikan dan memenuhi hak-hak masyarakat adat serta pemilik tanah dengan memberikan kompensasi yang adil dan manusiawi serta memastikan keberlanjutan mata pencaharian masyarakat lokal. Selain itu, kebijakan redistribusi ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang inklusif harus diimplementasikan untuk meminimalkan kesenjangan dan ketimpangan ekonomi antara warga masyarakat lokal dan masyarakat pendatang. Dengan demikian, pelaksanaan integrasi sosial di wilayah IKN dapat berjalan secara optimal guna menjaga keutuhan NKRI. Hal ini sejalan dengan Teori Persatuan dan Kesatuan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan struktur pemerintahan yang solid, dikarenakan adanya semangat kesatuan dan persatuan yang kuat di dalam negara kesatuan yang didukung oleh pelaksanaan integrasi sosial dan integrasi nasional yang kuat.⁴⁰

³⁹ Winardi. *Loc.Cit.*

⁴⁰ Isjwara, Fred. *Loc.Cit.*

Teori Persatuan dan Kesatuan menekankan pentingnya solidaritas dan kesamaan dalam mencapai integrasi sosial dalam masyarakat. Dalam konteks integrasi sosial di wilayah IKN, teori ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana berbagai kelompok sosial, budaya, dan etnis dapat bersatu untuk membentuk komunitas yang kohesif dan harmonis. Lebih lanjut dalam perspektif Teori Persatuan dan Kesatuan, integrasi sosial di wilayah IKN dapat dicapai melalui pembangunan solidaritas sosial, identitas kolektif, kebijakan dan program pemerintah yang inklusif, serta partisipasi aktif masyarakat. Dengan memfokuskan pada kesamaan dan tujuan bersama, berbagai kelompok yang berbeda dapat bersatu untuk membentuk komunitas yang harmonis, kohesif, dan integratif di wilayah IKN.

Selain itu, dalam perspektif Teori Persatuan dan Kesatuan yang dijiwai oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, cara pandang yang tepat dan komprehensif dalam melihat kebijakan pemerintah terkait perpindahan IKN dari Jakarta ke Nusantara pada hakikatnya merupakan perwujudan pengamalan Pancasila, khususnya sila ke-3 yaitu Persatuan Indonesia dan sila ke-5 yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Hal ini jelas terlihat karena pelaksanaan pembangunan IKN sebagai proyek strategis nasional merupakan salah satu langkah penting dalam pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, khususnya untuk menggeser fokus pembangunan dari Jawa-sentris ke Indonesia-sentris. Disamping itu, masih dalam perspektif Teori Persatuan dan Kesatuan, bahwa pelaksanaan pembangunan IKN juga merupakan ikhtiar optimalisasi pemerintah untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, khususnya terkait upaya untuk memajukan kesejahteraan umum sebagai wujud nyata pengamalan sila ke-5 Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

BAB IV PENUTUP

16. SIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka simpulan sebagai jawaban atas pertanyaan kajian dalam Taskap ini adalah sebagai berikut:

- a. Potensi disintegrasi sosial di wilayah IKN yang berdampak terhadap keutuhan NKRI dapat dilihat dengan menggunakan Analisis PESTEL yakni: politik (*politic*), ekonomi (*economy*), sosial (*social*), teknologi (*technology*), lingkungan (*environment*), dan hukum (*legal*). Faktor politik, potensi disintegrasi sosial di wilayah IKN yang berdampak terhadap keutuhan NKRI bisa dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat lokal, ancaman politik identitas, dan desentralisasi/otonomi daerah. Faktor ekonomi, potensi disintegrasi sosial di wilayah IKN yang berdampak terhadap keutuhan NKRI bisa dipicu oleh kesenjangan ekonomi, migrasi dan pengangguran, dan distribusi sumber daya. Faktor sosial, potensi disintegrasi sosial di wilayah IKN yang berdampak terhadap keutuhan NKRI bisa dipicu oleh perubahan demografis, budaya dan identitas lokal, dan disparitas sosial. Faktor teknologi, potensi disintegrasi sosial di wilayah IKN yang berdampak terhadap keutuhan NKRI dipicu oleh kesenjangan digital, dan ketergantungan pada teknologi. Faktor lingkungan, potensi disintegrasi sosial di wilayah IKN yang berdampak terhadap keutuhan NKRI dipicu oleh kerusakan lingkungan, dan pemindahan komunitas. Dan faktor hukum, potensi disintegrasi sosial di wilayah IKN yang berdampak terhadap keutuhan NKRI dipicu oleh kepastian hukum, dan penegakan hukum.
- b. Hambatan/tantangan pelaksanaan integrasi sosial di wilayah IKN yaitu:
 - 1) Kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi di Kalimantan Timur adalah hasil dari kombinasi berbagai faktor, termasuk ketergantungan pada sektor pertambangan, kurangnya diversifikasi ekonomi, infrastruktur yang tidak merata, pendidikan yang terbatas, kebijakan pemerintah yang

kurang efektif, dampak lingkungan dan sosial, serta migrasi dan urbanisasi yang tidak terkendali.

- 2) Ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial ini merujuk pada perbedaan yang mencolok dalam akses terhadap sumber daya dan kesempatan antara kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain. Untuk mengidentifikasi ketimpangan sosial di suatu wilayah, indikator yang umum digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
 - 3) Migrasi penduduk. Migrasi penduduk ke IKN merupakan salah satu tantangan dalam pelaksanaan integrasi sosial. Perpindahan penduduk yang masif ke IKN akan mengakibatkan bertemunya berbagai kelompok masyarakat dengan latar belakang etnis, budaya, agama, dan bahasa yang beragam. Hal ini jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan potensi gesekan di tengah masyarakat dan mengganggu integrasi sosial.
 - 4) Persaingan dalam penguasaan sumber daya. Persaingan dalam penguasaan sumber daya di IKN merupakan tantangan signifikan bagi pelaksanaan integrasi sosial. Dengan perpindahan penduduk yang besar-besaran ke IKN, terjadi peningkatan permintaan terhadap berbagai sumber daya, seperti lahan, air, energi, dan peluang ekonomi. Ketika kelompok-kelompok pendatang dan penduduk lokal berlomba-lomba menguasai sumber daya ini, potensi disintegrasi sosial menjadi lebih besar.
- c. Upaya optimalisasi integrasi sosial di wilayah IKN guna menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- 1) Mengatasi kesenjangan ekonomi. Solusinya adalah pembangunan infrastruktur ekonomi yang inklusif, program ekonomi berbasis komunitas, perlindungan terhadap sektor informal, dan pemberdayaan UMKM.
 - 2) Mengatasi ketimpangan sosial. Solusinya adalah dialog antarbudaya dan agama, pendidikan multikultural, kebijakan afirmatif, dan penguatan komunitas lokal.

- 3) Mengatasi migrasi penduduk. Solusinya adalah perencanaan urban yang inklusif, regulasi migrasi, kebijakan integrasi pendatang, dan penyediaan layanan publik yang merata.
- 4) Mengatasi persaingan dalam penguasaan sumber daya. Solusinya adalah pengaturan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan, kolaborasi pemerintah dengan masyarakat lokal, perlindungan hak-hak adat, dan pemberdayaan ekonomi berbasis sumber daya lokal.

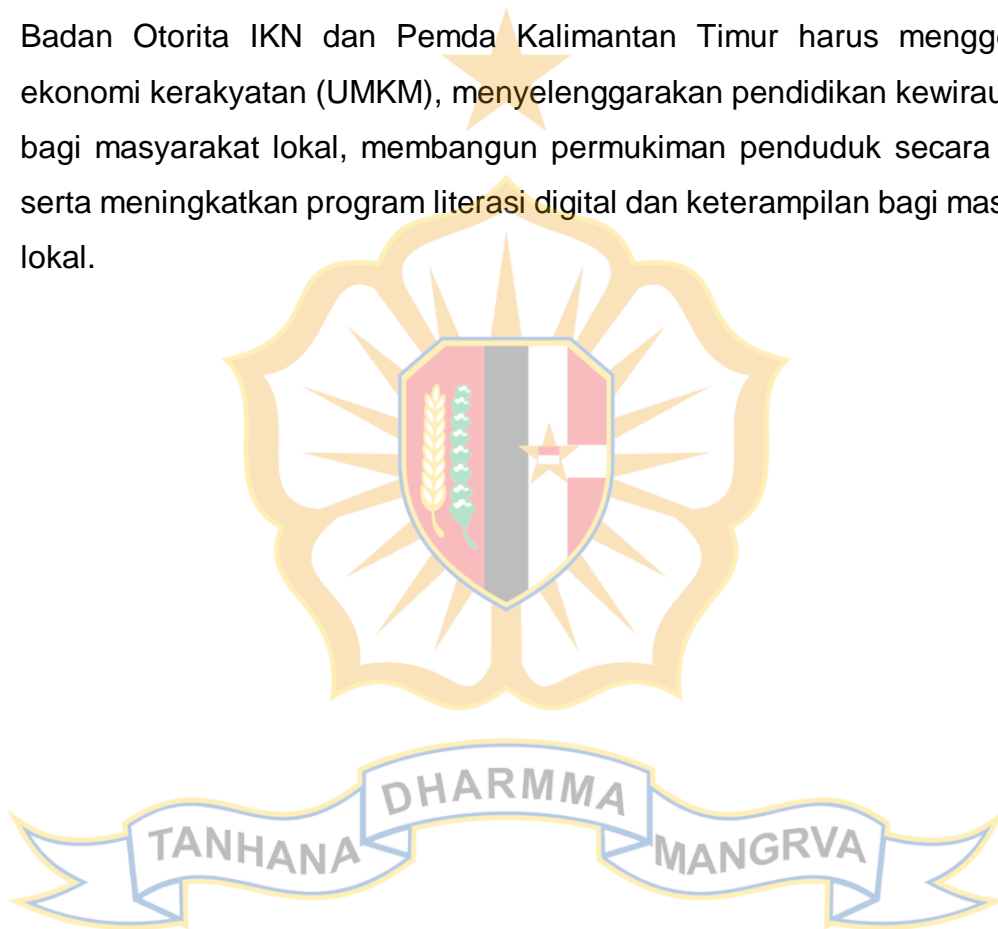
17. REKOMENDASI

Memperhatikan hasil analisis dan simpulan, maka ada beberapa rekomendasi yang bisa diajukan untuk mengoptimalkan integrasi sosial di wilayah IKN guna menjaga keutuhan NKRI sebagai berikut:

- a. Badan Otorita IKN (khususnya Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat) perlu melaksanakan koordinasi dan kerjasama lebih intens dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk:
 - 1) Melakukan penggalangan/dukungan masyarakat dengan pendekatan yang inklusif agar proses integrasi sosial di wilayah IKN guna menjaga keutuhan NKRI dapat berlangsung secara alamiah di tengah masyarakat, menanamkan kesadaran dalam masyarakat lokal maupun pendatang, bahwa harmoni kehidupan dan integrasi sosial di wilayah IKN merupakan kebutuhan dan tanggung jawab bersama serta harus diwujudkan secara bersama-sama.
 - 2) Merancang program pembangunan daerah yang inklusif. Fokus utamanya adalah upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan ketimpangan sosial di kawasan IKN serta wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN), Markas Besar TNI, dan Markas Besar Kepolisian Negara RI perlu menyiapkan proses perpindahan aparatur sipil negara (ASN) dan aparat keamanan ke IKN. Persiapan tersebut tidak hanya mencakup aspek teknis dan akomodasi, tetapi juga mencakup pembekalan dan motivasi agar mereka dapat diterima dengan

baik oleh masyarakat lokal. Pembekalan ini harus meliputi pengenalan dan peningkatan pemahaman mengenai nilai-nilai budaya dan adat-istiadat setempat sebelum mereka dipindahkan ke lokasi IKN, sehingga dapat mengoptimalkan integrasi sosial di wilayah IKN.

- c. Untuk mengoptimalkan integrasi sosial di wilayah IKN guna menjaga keutuhan NKRI pemerintah pusat dan Pemda Kalimantan Timur harus memperkuat hubungan kelembagaan dalam melaksanakan kebijakan otonomi daerah.
- d. Badan Otorita IKN dan Pemda Kalimantan Timur harus menggerakkan ekonomi kerakyatan (UMKM), menyelenggarakan pendidikan kewirausahaan bagi masyarakat lokal, membangun permukiman penduduk secara inklusif, serta meningkatkan program literasi digital dan keterampilan bagi masyarakat lokal.



Daftar Pustaka

Buku/Slide:

- Andono Mulyo, Sumedi. (2024). *Arah Kebijakan dan Keberlanjutan Pembangunan IKN Menuju Indonesia Emas 2045*. Jakarta: Slide paparan PPRA-LXVI Lemhannas RI Tahun 2024.
- Anggoro PW. (2018). *Kearifan Lokal Berbasis Transendental: Kasus Sengketa Lahan Adat di Kutai Barat Kalimantan Timur*. Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental.
- Berawi, Muhamad Ali. (2024). *Nusantara: Indonesia's Smart Sustainable Forest City*. Jakarta: Slide paparan PPRA-LXVI Lemhannas RI Tahun 2024.
- Biro Pusat Statistik RI. (2020). *Indeks Pembangunan Manusia 2020*. Jakarta: Publikasi BPS.
- Biro Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. (2021). *Provinsi Kalimantan Timur dalam Angka*.
- Darmawi, Herman. (2006). *Manajemen Resiko*. Jakarta: Bina Aksara.
- Effendy, Khasan. (2024). *Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara*, Jakarta: Slide paparan PPRA-LXVI Lemhannas RI Tahun 2024.
- (2024). *Implementasi Kebijakan IKN dari Perspektif Ekonomi Dalam Ketahanan Nasional*. Jakarta: Slide paparan PPRA-LXVI Lemhannas RI Tahun 2024.
- Hadiningrat, KP. Suharyono. S. (2024). *Kebijakan Pembangunan Ibu Kota Nusantara: Potensi Pengembangan dan Permasalahannya*. Jakarta: Slide paparan PPRA-LXVI Lemhannas RI Tahun 2024.
- Handoyo, B. Hestu Cipto. (2003). *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Harihanto. (2024). *Urgensi Pembangunan Ibu Kota Negara Dari Perspektif Lingkungan*. Jakarta: Slide paparan PPRA-LXVI Lemhannas RI Tahun 2024.

- Herdiawanto, Heri. (2024). *Keberlanjutan Kebijakan Politik di IKN Menuju Indonesia Emas Dalam Perspektif Keamanan Nasional*. Jakarta: Makalah dalam PPRA-LXVI Lemhannas RI Tahun 2024.
- Isjwara, Fred. (1974). *Pengantar Ilmu Politik*, Cetakan Kelima. Bandung: Binacipta.
- Jalal, Fasli. (2024). *Tantangan Pembangunan Sumber Daya Manusia di IKN dan Solusinya*. Jakarta: Slide paparan PPRA-LXVI Lemhannas RI Tahun 2024.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2020). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara*. Jakarta: PPN/Bappenas.
- (2022). *Kerangka Pembangunan Indonesia di Bidang IKN, Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Transformasi Digital dan Konsolidasi Demokrasi*. Paparan Zoom Lemhannas: Jakarta.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI. (2024). *Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara*. Jakarta: Slide paparan PPRA-LXVI Lemhannas RI Tahun 2024.
- Kutoyo, Sutrisno. (2004). *Sosiologi*. Jakarta: Penerbit Grasindo.
- Lemhannas RI. (2001). *Kewarganegaraan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lemhannas RI. (2012). *Geostrategi dan Ketahanan Nasional*. Jakarta.
- (2024). *Bahan Ajar Bidang Studi Empat Konsensus Dasar Bangsa*. Jakarta.
- (2024). *Bahan Ajar Bidang Studi Ketahanan Nasional*. Jakarta.
- (2024). *Bahan Ajar Bidang Studi Kewaspadaan Nasional*. Jakarta.
- Lubis, Djoharis. (2024). *Konsep Teori Bidang Studi Demografi dan Kebijakan Dalam Pembangunan IKN Beserta Permasalahan Serta Solusinya*. Jakarta: Slide paparan PPRA-LXVI Lemhannas RI Tahun 2024.
- Martha, Sukendra. (2024). *IKN Dalam Perspektif Geografis, Lingkungan dan Ketahanan Nasional*. Jakarta: Slide paparan PPRA-LXVI Lemhannas RI Tahun 2024.

- Nuridin, Nurliah. (2024). *Implementasi Kebijakan IKN Dalam Prespektif Sosial, Budaya, Politik*. Jakarta: Slide paparan PPRA-LXVI Lemhannas RI Tahun 2024.
- Nurhasim, Moch (Ed.). (2005). *Konflik Antar Elit Politik Lokal Dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. (2019). *Kajian Analisis Ketimpangan Wilayah*. Samarinda: Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.
- Pramodawardani, Jaleswari. (2024). *Rapat Koordinasi Isu Strategis Bidang Polhukam 2023: Pemilu, IKN, & Papua*. Jakarta: Slide paparan PPRA-LXVI Lemhannas RI Tahun 2024.
- Raharjo, Paiman. (2024). *Implementasi Kebijakan IKN Dalam Perspektif Sismennas*. Jakarta: Slide paparan PPRA-LXVI Lemhannas RI Tahun 2024.
- Sarwono, SW. (2009). *Psikologi Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Soemardjan, Selo dan Soemardi, Soelaeman. (1964). *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Sosiologi, Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suradinata, Ermaya. (2024). *Implementasi Kebijaksanaan IKN Dari Perspektif Ekonomi Dalam Ketahanan Nasional*. Jakarta: Makalah paparan PPRA-LXVI Lemhannas RI Tahun 2024.
- Susan, Novri. (2019). *Sosiologi Konflik: Teori-teori dan Analisis (edisi ke-3)*. Jakarta: Pranamedia Grup.
- Susanto, Astrid S. (1979). *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*. Bandung: Bina Cipta.
- Taruna, Sri Handoko. (2022). *Peta Konflik Sosial di Daerah*. Paparan Direktorat Kewaspadaan Nasional Kemendagri Pada Pelatihan Peningkatan Kepemimpinan Perempuan Perdamaian.
- Tony M, Wijaya. (2018). *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Umbu Pati, Thomas. (2024). Kebijakan Politik di IKN Dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045. Slide paparan PPRA-LXVI Lemhannas RI Tahun 2024.

Usman, W. (1999). *Tinjauan Ilmiah Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional*. Jakarta: Program PKN Pascasarjana UI.

Wahyuni, Sri. (2024). *Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penyangga IKN Dalam Kebijakan Pusat dan Daerah*. Jakarta: Slide paparan PPRA-LXVI Lemhannas RI Tahun 2024.

Jurnal:

Retnowati. (2014). "AGAMA, KONFLIK, DAN INTEGRASI SOSIAL: (Integrasi Sosial Pasca Konflik Situbondo)". *Jurnal Analisa*, Vol. 21 No. 02.

Sari, Galih Kartika. (2022). Integrasi Pembangunan Ibu Kota Negara Baru dan Daerah Penyangganya. *Jurnal STANDART: Better Standart Better Living*. Vol. 1, No. 2, Maret 2022.

Peraturan Perundang-undangan:

UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara.

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Negara.

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Negara.

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Ibu Kota Negara Tahun 2022-2042.

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Tanah di Ibu Kota Negara.

Peraturan Kepala Otoritas Ibu Kota Negara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Izin Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Negara.

Internet:

Pramono Dwi Susetyo 2022. *Beban Ekologis IKN*.
<https://www.kompas.id/baca/artikel-opini/2022/03/13/beban-ekologis-ikn>.

Diakses, Senin 19 Februari 2024, jam 17.45 WIB.

Mantalean V. 2022. *Megaproyek IKN, 20.000 Masyarakat Adat Tersingkir dan Dugaan 'Hapus Dosa' Korporasi*. Internet. Diakses, Senin 19 Februari 2024 jam 13.30 WIB dari link <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/21/08204891/Megaproyek-Ikn20000-Masyarakat-Adat-Tersingkir-Dan-Dugaan-Hapus-Dosa>.

Jayani DH. (2019). *Konflik Massal di Kalimantan Timur Lebih Tinggi Dibanding Wilayah Kalimantan Lainnya*. Internet. Diunduh pada tanggal 20 Februari 2024 jam 9.15 WIB dari laman <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/08/27/konflik-massal-kalimantan-timur-lebih-tinggi-dibandingkan-wilayah-kalimantan-lainnya>.

Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2022). *Menyambut Nusantara*. Internet. Diakses pada 19 Mei 2024 dari link <https://www.kemenkopmk.go.id/menyambut-nusantara>.

Kondisi Wilayah Kaltim, diakses dari laman resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur <https://kaltimprov.go.id/halaman/kondisi-wilayah>.

Sensus Penduduk 2020 Mencatat Jumlah Penduduk Kalimantan Timur sebanyak 3,77 Juta Jiwa. 2021. <https://kaltim.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/851/sensus-penduduk-2020-mencatat-jumlah-penduduk-kalimantan-timur-sebanyak-3-77-juta-jiwa.html>. Diakses tanggal 19 Maret 2024, jam 22.00 WIB.

<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/03/03/sempat-ditangkap-soal-lahan-bandara-ikn-penahanan-9-warga-ditangguhkan>, diakses pada Selasa 19 Maret 2024 jam 22.10 WIB.

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/5550029/ahy-masih-ada-2086-hektare-lahan-di-ikn-bermasalah>, diakses pada Rabu, 20 Maret 2024 jam 15.30 WIB.

<https://paydia.id/analisis-pestel-untuk-strategi-bisnis/Diakses> pada Rabu, 15 Agustus 2024 jam 15.20 WIB.

chrome-

<extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://repo.darmajaya.ac.id/2490/6/BAB%20II.pdf>. Diakses pada Rabu, 15 Agustus 2024 jam 15.40 WIB.

<https://www.aman.or.id/story/masyarakat-adat-di-penajam-paser-utara-tergusur-oleh-pembangunan-ikn>. Diakses pada Jumat, 16 Agustus 2024 jam 13.30 WIB.

chrome-

<extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://bappeda.kaltimprov.go.id/storage/file/5eMkdEYQAiaonNP6.pdf>. Diakses pada Sabtu, 17 Agustus 2024 jam 8.10 WIB.

<https://kaltim.bps.go.id/pressrelease/2023/12/01/1018/indeks-pembangunan-manusia--ipm--kalimantan-timur-tahun-2023-berstatus-tinggi-yakni-sebesar-78-20.html>. Diakses pada Sabtu, 17 Agustus 2024 jam 9.35 WIB.

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20230130/9/1622913/migrasi-penduduk-ke-kalimantan-naik-3-kali-lipat-gara-gara-ikn>. Diakses pada Sabtu 17 Agustus 2024 jam 13.35 WIB.



LAMPIRAN:

Lampiran 1

ALUR PIKIR

**OPTIMALISASI INTEGRASI SOSIAL DI WILAYAH IBU KOTA NEGARA
GUNA MENJAGA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**



DAFTAR TABEL

Tabel 1
PDRB dengan Harga Berlaku
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur 2023

No.	Kab/Kota	PDRB (dalam juta Rp)
1	Kab. Paser	37.493.831,39
2	Kab. Kutai Barat	23.848.653,52
3	Kab. Kutai Kertanegara	135.406.045,93
4	Kab. Kutai Timur	104.663.188,97
5	Kab. Berau	31.570.052,94
6	Kab. Penajam Paser Utara	9.652.648,86
7	Kab. Mahakam Ulu	1.852.956,21
8	Kota Balikpapan	97.060.152,81
9	Kota Samarinda	53.604.333,00
10	Kota Bontang	42.633.628,07

Sumber: BPS Kaltim, 2023

Tabel 2
PDRB Perkapita dengan Harga Berlaku
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur 2023

No.	Kab/Kota	PDRB Perkapita (dalam juta Rp)
1	Kab. Paser	208,43

2	Kab. Kutai Barat	222,08
3	Kab. Kutai Kartanegara	270,72
4	Kab. Kutai Timur	369,42
5	Kab. Berau	198,53
6	Kab. Penajam Paser Utara	87,26
7	Kab. Mahakam Ulu	100,94
8	Kota Balikpapan	201,64
9	Kota Samarinda	104,97
10	Kota Bontang	366,46

Sumber: BPS Kaltim, 2023

Tabel 3
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur 2023

No.	Kab/Kota	IPM
1	Kab. Paser	74,14
2	Kab. Kutai Barat	73,72
3	Kab. Kutai Kertanegara	75,30
4	Kab. Kutai Timur	74,98
5	Kab. Berau	76,21
6	Kab. Penajam Paser Utara	73,30
7	Kab. Mahakam Ulu	69,59
8	Kota Balikpapan	81,66
9	Kota Samarinda	82,32
10	Kota Bontang	81,56

Sumber: BPS Kaltim, 2023

Tabel 4
Angka Kemiskinan
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur 2023

No.	Kab/Kota	Kemiskinan
1	Kab. Paser	9,11
2	Kab. Kutai Barat	9,72
3	Kab. Kutai Kertanegara	7,61
4	Kab. Kutai Timur	9,06
5	Kab. Berau	5,54
6	Kab. Penajam Paser Utara	6,97
7	Kab. Mahakam Ulu	11,38
8	Kota Balikpapan	2,31
9	Kota Samarinda	4,81
10	Kota Bontang	4,11

Sumber: BPS Kaltim, 2023



DAFTAR NAMA PEJABAT DI LINGKUNGAN OTORITA IBU KOTA NUSANTARA		
NO	JABATAN	NAMA
1	(Plt). Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara	Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc
2	(Plt.)Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara	Raja Juli Antoni, Ph.D
3	Sekretaris	Dr. Achmad Jaka Santos Adiwijaya S.H., LLM
4	(Plt.) Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan	Agung Dodit Muliawan, Ph.D, Ak., CA
5	Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan	Mia Amalia, S.T., M.Si, Ph.D.
6	Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan	Dr. Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi, M.Si.
7	Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat	Drs. H. Alimuddin, M.Si.
8	Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital	Prof. Mohammed Ali Berawi, M.Eng.Sc., Ph.D
9	Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	Dr. Myrna Ashawati Safitri, S.H., M.S.I.
10	Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi	Dr. Agung Wicaksono, M.Sc., M.B.A.
11	Deputi Bidang Sarana dan Prasarana	Silvia Halim
STAF KHUSUS KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA		
12	Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik	Troy Harrold Yohanes Pantouw, P.S. Psi., MA., FPR.

SEKRETARIAT		
13	Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Kerja Sama	I Gusti Agung Krisna Murti RS, S.Sos, M.M.
14	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat	Drs. Firmananur, M.Si.
15	Kepala Biro Keuangan, Barang Milik Negara, dan Aset Dalam Penguasaan	Muji Budda'wah, S.E., M.E.
16	Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	Tito Gesit Utiarto, S.E.
UNIT KERJA HUKUM DAN KEPATUHAN		
17	Direktur Hukum	Dr. Agung Purnomo, S.H., M.Hum.
18	Direktur Kepatuhan	Dr. I Made Suwarjana, S.H., M.Hum.
19	Direktur Pengawasan dan Audit Internal	Agung Dodit Muliawan, Ph.D, Ak., CA
DEPUTI BIDANG PERENCANAAN DAN PERTANAHAN		
20	Direktur Perencanaan Makro	Dr. Agustomi Masik, M.Dev.Plg.
21	Direktur Perencanaan Mikro	-
22	Direktur Pertanahan	Dr. Firyadi, S.P., M.Si.
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PEMBANGUNAN		
23	(Plt.) Direktur Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Perizinan Pembangunan	Kuswanto, S.STP., MURP., Ph.D.
24	Direktur Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi	Ferdinand Kana Lo, S.T., M.T.
25	Direktur Ketentraman dan Ketertiban Umum	Fransiscus Barung Mangera, S.I.K., M.Han.

DEPUTI BIDANG SOSIAL, BUDAYA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
26	Direktur Pelayanan Dasar	Dr. Suwito, SKM, M.Kes.
27	Direktur Pemberdayaan Masyarakat	Dr. Conrita Ermanto, M.Si.
28	Direktur Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	Muhsin Palinrungi, S.S., M.A.
DEPUTI BIDANG TRANSFORMASI HIJAU DAN DIGITAL		
29	Direktur Pengembangan Ekosistem Digital	Tonny Agus Setiono, S.Si.T., M.T.
30	Direktur Transformasi Hijau	Agus Gunawan, ST., M.Eng.
31	Direktur Data dan Kecerdasan Buatan	Dr. Adhiguna Mahendra, S.Kom., M.Sc., M.Kom., M.Eng.
DEPUTI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM		
32	Direktur Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	Dr. Onesimus Patiung, S.Hut., M.P.
33	Direktur Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air	Pungky Widiaryanto, S.Hut., M.Sc.
34	Direktur Ketahanan Pangan	Dr. P. Setia Lenggono, S.Sos., M.Si.
DEPUTI BIDANG PENDANAAN DAN INVESTASI		
35	Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha	Lazuardi Nasution, MBA.
36	Direktur Pendanaan	Insyafiah, S.E., Ak., M.B.A.
37	Direktur Pembiayaan	Muh. Naufal Aminuddin, S.T., M.M.
DEPUTI BIDANG SARANA DAN PRASARANA		
38	Direktur Sarana Prasarana Dasar	Ir. Agus Ahyar, MSc.
39	Direktur Sarana Prasarana Sosial	dr. Silveria Octaviana Bailia, M.M.

40	Direktur Pengelolaan Gedung, Kawasan dan Perkotaan	Dr. Ir. Desiderius Viby Indrayana, ST., MM., MT., IPU., ASEAN Eng., ACPE
TENAGA AHLI PIMPINAN		
41	Tenaga Ahli Bidang Mobilitas Perkotaan	Dr. Ir. Resdiansyah, S.T., M.T., IPM.
42	Tenaga Ahli Bidang Perancangan Perkotaan	Vallin Tsarina, S.T.
43	Tenaga Ahli Bidang Kerja Sama dan Ekonomi Kreatif	Panji Himawan, S.E.
44	Tenaga Ahli Bidang Ekonomi	Fauziah Zen, M.T., Ph.D.
45	Tenaga Ahli Bidang Inovasi Pelayanan dan Kemitraan Publik	Dr. Susianah, M.Si.
46	Tenaga Ahli Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Regional dan Daerah Mitra	Rusmin Lawin, S.H.
KEPALA BAGIAN PADA BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG/JASA, SEKRETARIAT OTORITA IKN		
47	Kepala Bagian Tata Usaha	Dr. Satya Pranata Asmara, S.Sos., M.B.A.
48	Kepala Bagian Protokol	Irfan Darmawan Syah, S.E.
49	Kepala Bagian Rumah Tangga	Eko Yudhayanto, S.T., M.Si.

*Berdasarkan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita IKN, susunan organisasi Otorita IKN terdiri dari Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN, serta sembilan Jabatan Tinggi Madya, yakni 1 Sekretaris, 7 Deputi, serta 1 Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan. Daftar Nama Pejabat di Lingkungan Otorita IKN di atas telah mengalami perubahan dari komposisi awal, dan kemudian disusun kembali sejalan dengan dinamika dan perkembangan mutakhir.

Lampiran 4

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
STAF SUMBER DAYA MANUSIA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : RENDRA RADITA DEWAYANA, S.I.K.
Pangkat/NRP : KOMBES POL / 73120426
Jabatan/TMT : ANALIS KEBIJAKAN MADYA BIDANG AKPOL LEMDIKLAT POLRI (DLM RANGKA DIK LEMHANNAS PPRA LXVI T.A. 2024) (23-01-2024)
Lama Jabatan : 0 Tahun 5 Bulan 11 Hari
Tempat, Tanggal Lahir : KABUPATEN SUKOHARJO, 02-12-1973
Agama : ISLAM
Suku : JAWA
Status Personel : AKTIF

I. Pendidikan Kepolisian

Tingkat	Tahun
SESPIMMEN	2010
PTIK	2004
AKPOL	1995

II. Pendidikan Umum

Tingkat	Nama Institusi	Tahun
SMA	4 SURAKARTA	1992
SMP	1 KARTASURA	1989
SD	KARTASURA III	1986

III. Riwayat Pangkat

Pangkat	TMT
KOMBES POL	01-07-2020
AKBP	01-01-2011
KOMPOL	01-07-2006
AKP	01-01-2002
IPTU	01-10-1998
IPDA	01-08-1995

IV. Riwayat Jabatan

Jabatan	TMT
ANALIS KEBIJAKAN MADYA BIDANG AKPOL LEMDIKLAT POLRI (DLM RANGKA DIK LEMHANNAS PPRA LXVI T.A. 2024)	23-01-2024
DOSEN UTAMA AKPOL LEMDIKLAT POLRI (IIB3)	26-07-2021
DIRRESNARKOBA POLDA PAPUA BARAT (IIB3)	22-04-2020
DIRRESNARKOBA POLDA PAPUA BARAT (IIB3)	03-02-2020
WADIRRESNARKOBA POLDA JATENG (IIIA1)	03-02-2017
KAPOLRES BLITAR POLDA JATIM (IIIA2)	07-09-2016
KAPOLRES SUMENEP POLDA JATIM (IIIA2)	16-12-2014
KADENTAR KORBINTARSIS DITBINTARLAT AKPOL LEMDIKPOL	24-05-2011
PAMEN LEMDIK (DIARAHKAN KE AKPOL)	06-10-2010
KASAT RESKRIM POLTABES DENPASAR	06-02-2008
KANIT IV SAT OPSNAL I DITRESKRIM POLDA BALI	09-08-2006
KANIT I SATOPSNAL III DITRESKRIM POLDA BALI	28-02-2006
KAPOLSEK KUTA POLTABES DENPASAR	25-08-2005
KAPOLSEK DENPASAR TIMUR POLTABES DENPASAR	28-02-2005
KANIT I SATOPSNAL IV DITINTELKAM POLDA BALI	23-03-2004
PAMA POLDA BALI	29-02-2004
PAMA PTIK	11-09-2002
KAPOLSEK BATULICIN POLRES KOTA BARU	19-10-2001
KAPOLSEKTA BANJAR UTARA POLRESTA BANJARMASIN	01-11-1998
KASATSABHARA POLRES KOTABARU POLDA KALSEL (IVA)	22-12-1997
PAMA POLDA KALSEL	10-07-1996

V. Pendidikan Pengembangan & Pelatihan

Dikbang	TMT
Data pendidikan pengembangan dan pelatihan tidak ditemukan	

VI. Tanda Kehormatan

Tanda Kehormatan	TMT
SATYALANGANA PENGABDIAN 16 TAHUN	2012

VII. Kemampuan Bahasa

Bahasa	Status
INGGRIS	TIDAK AKTIF
JAWA	AKTIF

VIII. Penugasan Luar Struktur

Penugasan	Lokasi
Data penugasan luar struktur tidak ditemukan	

Jakarta, 04 - 07 - 2024

ANALIS KEBIJAKAN MADYA BIDANG
AKPOL LEMDIKLAT POLRI (DLM
RANGKA DIK LEMHANNAS PPRA LXVI
T.A. 2024)

RENDRA RADITA DEWAYANA, S.I.K.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP
73120426